

E-NEWSLETTER

**PKS** PARLEMEN

KREATIF

Edisi Januari IV Tahun 2021 No. 4

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



*Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari*

*Komcad  
Sukarela dan  
Wajib Jaga  
Netralitas*

## Jangan Selalu Salahkan Masyarakat

Pemerintahan dalam konsep demokrasi adalah terdiri atas eksekutif, legislatif, dan yudikatif

Dalam perkembangannya, konsep ini beradaptasi dan mencari keseimbangan sesuai dengan tempat atau waktu. Meskipun secara gagasan demokrasi serupa, namun dalam implementasi bisa sangat berbeda.

Awalnya demokrasi muncul dari Athena (Yunani), akhirnya ternyata tumbuh subur dan berkembang di Amerika. Di benua Asia banyak negara menerapkan sistem ini, termasuk Indonesia. Asimilasi gagasan dan *public sphere* terjadi antara demokrasi dengan 'Indonesia', hingga kemudian lahir sebuah konsensus tentang Demokrasi Pancasila.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Ditegaskan dalam situs

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 memiliki keunggulan tertentu. Diantaranya mengutamakan pengambilan keputusan **dengan musyawarah mufakat dalam semangat kekeluargaan**. Mengutamakan **keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban**, antara kepentingan pribadi dan sosial. Lebih mengutamakan **kepentingan dan keselamatan bangsa** di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Jika dicermati setiap point diatas, maka apa yang termaktub dalam demokrasi Pancasila selaras dengan ungkapan Cicero, "*Salus populi suprema lex esto*" keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara. Bagaimana dengan realitasnya? Demokrasi Pancasila nampak jauh panggang dari api.

Belum lama ini ada buku baru yang mencoba menggugat fungsi Pemerintah dalam prosesnya seringkali menyalahkan publik. "*It's the Government, Stupid: How Governments Blame Citizens for Their Own Policies.*" Meski dalam resensinya menyortir lima anomali bidang kebijakan; kejahatan senjata, obesitas,

tunawisma, perjudian, dan narkoba. Tapi sesungguhnya sangat relevan dengan apa yang sedang terjadi di Indonesia dalam konteks tata kelola Pemerintahan.

Pemerintah telah mengembangkan kebiasaan yang nyaman untuk menyalahkan masalah sosial pada warganya, menempatkan terlalu banyak penekanan pada tanggung jawab pribadi dan mengejar kebijakan untuk 'mendorong' warganya ke perilaku yang lebih baik. Sibuk mengkoreksi publik, namun lalai menunaikan tugas utamanya.

Tengok saja, saat kondisi positif Corona capai 300.000, Satgas Covid-19 salahkan Masyarakat. Pun pada ketika kasus menyentuh angka 1 Juta suspect. Otoritas sibuk menyalahkan masyarakat akibat tidak taat protokol kesehatan (prokes). Narasi ini diulang-ulang dan ditekankan disejulang kesempatan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sempat mengatakan "kapok menggunakan data Kemenkes" karena tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Solusinya akan menggunakan data Komisi Pemilihan Umum untuk memperbaiki data, karena

Pemerintah telah mengembangkan kebiasaan yang nyaman untuk menyalahkan masalah sosial pada warganya, menempatkan terlalu banyak penekanan pada tanggung jawab pribadi dan mengejar kebijakan untuk 'mendorong' warganya ke perilaku yang lebih baik. Sibuk mengkoreksi publik, namun lalai menunaikan tugas utamanya.

lembaga tersebut menjalankan pemilu baru-baru ini sehingga memiliki data terkini. Lucu kan?

Agar masyarakat mematuhi anjuran prokes maka pemerintah harus memberi teladan yang baik. Semua kegiatan pemerintah apapun bentuknya sudah sepatutnya tidak melanggar prokes yang dicanangkan sendiri.

Persoalan lain, terbaru Peraturan Presiden (Perpres) tentang pencegahan dan penanggulangan ekstremisme disebut banyak pihak maupun koalisi masyarakat sipil rawan disalahkan karena oleh kelompok tertentu lantaran tidak jelasnya batasan ekstremisme di Indonesia. Pasalnya dalam Perpres tersebut, masyarakat

dipersilakan untuk melapor ke polisi jika mencurigai adanya individu atau kelompok yang dicurigai sebagai ekstremis.

Lalu dimana nilai-nilai masyarakat mufakat hidup? Selama ini pemegang otoritas menjalankan kebijakan justru sibuk dan senang membangun kompetisi berbasis wacana. Dengan gelontoran miliaran rupiah memasang garda terdepan para influencer sosial media yang siap nerkam, menghantam bahkan hingga mempidanakan. "rights or wrong, it's my corps". Bahkan mereka dianggap sebagai warga 'kebal hukum', meski sembaran hate speech meluncur deras dari cuitan dan status mereka. Aneh kan?



**PKS**

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

*Kreatif, Atraktif, Substantif*



# HNW Apresiasi Bila Konsep Presisi Kapolri Diterapkan terhadap Kasus Rasisme, Juga bagi Kasus Lain

## KUTIPAN

Jakarta (27/01) — Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, memuji konsep Presisi (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan)

yang disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang sudah terlihat dipraktekkan dalam kasus ujaran rasisme terhadap Natalius Pigai oleh Ambroncius Nababan, yang oleh Polisi telah ditetapkan sebagai tersangka.

HNW saapan akrabnya menilai, meski hari ini Jenderal Pol Listyo Sigit baru dilantik sebagai Kapolri, tetapi konsep tersebut sudah diterapkan pada satu hari sebelumnya oleh jajaran Polri.

"Bagus, konsep Presisi yang menjadi komitmen Kapolri sudah mulai dilaksanakan dalam kasus ujaran kebencian dan rasisme terhadap Saudara Natalius Pigai, tokoh Papua, mantan anggota KomnasHAM" ujarnya melalui siaran pers di

Jakarta, Rabu(27/01).

"Karena sebelumnya sering ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa mereka yang merupakan relawan Jokowi dapat bebas menghina atau berperilaku rasis, karena merasa kebal hukum, karena tak diproses hukum yang sebenarnya oleh Kepolisian. Padahal Presiden Jokowi berkali-kali menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Dan Hukum harus diberlakukan dengan benar" ujarnya.

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta II ini berharap langkah awal yang baik dengan dilaksanakannya janji 'presisi' oleh Kapolri ini perlu diapresiasi dan didukung

bersama, untuk membuktikan bahwa hukum ditegakkan secara adil, tanpa adanya tebang pilih.

"Maka penting ditindak juga mereka yang melakukan kejahatan tersebut terhadap Saudara Natalius Pigai, sebelum dan sesudah yang dilakukan oleh Ambroncius Nababan ini. Bahkan, juga terhadap kasus-kasus rasisme lainnya, dan kasus2 hukum lainnya." tukasnya.

Apalagi masalah rasisme terhadap Natalius Pigai sudah menjadi perhatian masyarakat luas. Sehingga masyarakat juga melaporkan kepada Polisi pihak selain Ambroncius Nababan yang diduga mengolok-olok Natalius Pigai secara rasis.

"DPP KNPI misalnya melaporkan Permadi Arya (Abu Janda), juga DPP Partai Demokrat juga minta Polisi tangkap Prof Yusuf Leonard Henuk karena kasus serupa. Sebelumnya warga juga banyak yang mengadukan kasus rasisme terhadap Anies Baswedan maupun Habib Rizieq Syihab. Maka demi keseriusan melaksanakan



**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A**  
Wakil Ketua MPR RI

"Bagus, konsep Presisi yang menjadi komitmen Kapolri sudah mulai dilaksanakan dalam kasus ujaran kebencian dan rasisme terhadap Saudara Natalius Pigai, tokoh Papua, mantan anggota KomnasHAM"

kebijakan 'presisi' dan bahwa itu dilakukan dengan konsisten dan karenanya keadilan hukum dipraktekkan, sudah semestinya berbagai laporan masyarakat itu juga diproses secara hukum," ujarnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Ketua FPKS: Selamat Bertugas Jenderal Listyo Sigit, Kita Tunggu Janji Wujudkan Hukum Berkeadilan

## KUTIPAN

Jakarta (27/01) — Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengucapkan selamat atas pelantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai sebagai Kapolri hari ini.

Jazuli mengapresiasi janji dan komitmen Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang ingin benar-benar mewujudkan hukum yang berkeadilan saat fit and proper test di DPR pekan sebelumnya.

"Atas nama pimpinan dan anggota Fraksi PKS DPR RI kami ucapkan selamat bertugas kepada Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang hari ini dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Kapolri," ungkap Jazuli.

Fraksi PKS berpesan agar Kapolri memenuhi komitmen dan janjinya untuk benar-benar mewujudkan hukum yang berkeadilan. Hukum yang berkeadilan ini, lanjut Jazuli, patut digarisbawahi dengan tinta tebal karena menjadi misi utama penegakan hukum oleh

aparatus penegak hukum, dalam hal ini kepolisian.

Fraksi PKS mengapresiasi Jenderal Listyo yang menempatkannya sebagai bagian terpenting dalam pengembangan dan transformasi Polri ke depan melalui konsep Presisi (prediktif, responsibilitas, dan transparan berkeadilan).

Anggota Komisi I DPR ini membeberkan bahwa keadilan hukum di tangan Polri akan terwujud dengan sejumlah syarat:

Pertama, kata Jazuli, hukum yang berdiri tegak, berdiri di tengah, dan tidak condong pada kepentingan kekuasaan.

"Kedua, hukum yang bisa membedakan antara kriminal (murni) dan kriminalisasi

(kasus), antara ujaran kebencian dan permusuhan yang memecah belah bangsa dengan kritik dan kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi," ungkapnya.

Ketiga, imbuhnya, hukum yang tidak pandang bulu, tidak hanya tajam bagi yang di bawah (rakyat biasa) tapi tumpul bagi yang di atas.

"Keempat, hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat dan bukan semata mengejar kepastian hukum. Atas nama rasa keadilan masyarakat, proses hukum harus bijak melihat suatu kasus terhadap masyarakat dan kelompok lemah agar tidak dilanjutkan pidananya (restorative justice)," terang Jazuli.

"Jenderal Listyo Sigit telah berjanji agar tidak terjadi lagi orang-orang miskin dan lemah dipidana seperti pada kasus Nenek Minah yang dipidana karena mencuri beberapa butir kakao atau kasus anak mempolikannya ibu kandungnya. Ini sangat kita apresiasi dan kita dukung penuh," tegas



Ketua Fraksi PKS DPR RI **Dr. H. Jazuli Juwaini, MA** (tengah) saat bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beberapa waktu lalu.

**“Hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat dan bukan semata mengejar kepastian hukum. Atas nama rasa keadilan masyarakat, proses hukum harus bijak melihat suatu kasus terhadap masyarakat dan kelompok lemah agar tidak dilanjutkan pidananya (restorative justice)”**

Jazuli.

Selain itu, Jazuli juga mendukung penuh komitmen Jenderal Sigit yang akan mentransformasi wajah aparat kepolisian yang lebih humanis dan persuasif, serta mengikis kesan arogan, pungli, serta kesan ketidakadilan

penanganan kasus oleh Polri melalui transparansi.

"Kalau semua komitmen itu dilaksanakan, kita acungkan jempol buat Polri di bawah Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Fraksi PKS akan mengawasi secara kritis dan konstruktif," pungkas Jazuli.

# Angka Covid-19 Tembus Satu Juta

## Netty Singgung Klaim Pemerintah Soal Penanganan Pandemi yang Terkendali

### KUTIPAN

Jakarta (27/01) — Kasus Covid-19 di Indonesia hingga Selasa (26/01/2021) sudah mencapai angka 1.012.350 kasus. Angka ini lebih banyak dari total seluruh kasus di negara-negara Asia Tenggara lainnya yang berjumlah 917.279 kasus.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetyani menyinggung penanganan pandemi yang masih berantakan dari hulu ke hilir. "Dari hulu ke hilir penanganan COVID-19 oleh pemerintah masih berantakan. Sejumlah persoalan masih jadi PR di lapangan, mulai dari 3T yang rendah dan belum merata, proses 3M yang longgar, kekurangan ruang isolasi dan nakes, realisasi insentif nakes yang belum 100 persen, sengkaret data vaksinasi, hingga buruknya komunikasi publik," kata Netty dalam keterangan media, Rabu (27/01).

Netty juga menyebut

adanya dugaan moral hazard dalam pengelolaan anggaran pandemi triliunan rupiah, yang seolah jadi bancakan untuk memperkaya diri dan kelompok, seperti dalam distribusi bansos, Kartu Prakerja, dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Jadi kalau pemerintah menyebut telah mengendalikan krisis pandemi dan ekonomi dengan baik, menurut saya, ini asumsi-asumsi yang patut dipertanyakan kebenarannya. Di mana letak keberhasilannya? Apa ukuran dan indikatornya? Sementara kasus Covid-19 di Indonesia kembali pecah rekor dan menjadi yang tertinggi di seluruh Asia Tenggara," tambah

Ketua Tim Covid-19 FPKS DPR RI ini.

"Angka positivity rate Covid-19 Indonesia mencapai persentase 33,24%, yang artinya lebih dari enam kali lipat dari angka 5 persen ambang batas minimal positivity rate yang ditetapkan oleh standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)" kata Netty.

"Dari sisi ekonomi, kita sudah masuk jurang resesi pada kuartal III-2020. Realisasi laju perekonomian minus 3,49 persen, di mana sebelumnya sempat terperosok ke angka 5,32 persen. Jadi tolong dijelaskan, atas dalih apa jika pemerintah klaim telah terjadi keberhasilan pemulihan ekonomi?" tanya Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI.

Terakhir Netty mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 ini adalah masalah serius yang penerapan kebijakannya harus tegas, konsisten dan tidak tebang pilih.

"Masuknya WN China di tengah kebijakan penutupan akses oleh pemerintah hingga 8



**Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si**  
Anggota Komisi IX DPR RI

"Adanya dugaan moral hazard dalam pengelolaan anggaran pandemi triliunan rupiah, yang seolah jadi bancakan untuk memperkaya diri dan kelompok, seperti dalam distribusi bansos, Kartu Prakerja, dan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau pemerintah menyebut telah mengendalikan krisis pandemi dan ekonomi dengan baik, menurut saya, ini asumsi-asumsi yang patut dipertanyakan kebenarannya."

Februari tentu membuat kita kaget dan tidak habis pikir. Apa pun alasan pengecualian, kejadian tersebut berpotensi menjadi preseden buruk pemerintah di mata publik. Rakyat jadi bingung dan

bertanya-tanya: semetara mobilitas dan aktivitas mereka dibatasi, mengapa orang luar yang berpotensi membawa virus varian baru malah dibiarkan masuk?," tanya Netty mengakhiri.

Prajurit TNI Kembali  
Tewas di Papua,



# Anggota FPKS: Seakan Ada Pembiaran Dari Pemerintah

## KUTIPAN

Korban berjatuhan dari pihak TNI masih saja terjadi, ini seakan ada pembiaran dari pemerintah. Ini menunjukkan intenitas gangguan kamtibmas yang masih tinggi di Papua. Semestinya ada upaya serius mengatasi hal ini supaya tidak ada lagi korban aparat TNI-POLRI dan juga warga sipil. Kami berharap Pak Menhan Prabowo segera bergerak

### Data Media

Kompas 22/1/2021

“Total sudah terjadi empat kali aksi KKB pada awal tahun ini di Papua.”

Letkol. Inf. **Beny Wahyudi**  
Komandan Distrik Militer  
1705/Nabire

**H. SUKAMTA, Ph.D**

Anggota Komisi I DPR RI



# Prajurit TNI Kembali Tewas di Papua, Aleg PKS: Penanganan KKB Setengah Hati

## KUTIPAN

Jakarta (24/01) — Dua prajurit TNI dari Yonif R 400/BR, Pratu Roy Vebrianto dan Pratu Dedi Hamdani dikabarkan tewas dalam baku tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Intan Jaya, Papua, Jumat (22/01/2021).

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyatakan bela sungkawa yang mendalam-dalamnya.

Sukamta juga menyalahkan pemerintah terkesan diam atas jatuhnya kembali korban dari TNI yang bertugas di Papua.

"Korban berjatuh dari pihak TNI masih saja terjadi, ini seakan ada pembiaran dari pemerintah. Seingat saya bulan November lalu ada 1 personil TNI gugur, kemudian masih di bulan ini ada 1 lagi yang gugur. Ini menunjukkan intensitas gangguan kamtibmas yang masih tinggi di Papua.

Semestinya ada upaya serius mengatasi hal ini supaya tidak ada lagi korban aparat TNI-POLRI dan juga warga sipil. Kami berharap Pak Menhan Prabowo segera bergerak", papar Sukamta.

Lebih lanjut Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga menyoroti pendekatan pemerintah dalam mengatasi KKB yang dianggap terlalu lunak, sehingga kelompok separatis ini masih leluasa bergerak melakukan serangan kepada aparat keamanan dan warga sipil.

"Selama ini penanganan KKB terkesan setengah hati. Coba bandingkan dengan

Operasi Tinombala di Poso yang berhasil menumpas kelompok Santoso. Dalam operasi tersebut pemerintah kerahkan satuan tempur yang punya reputasi handal seperti Brimob, Kostrad, Marinir, Raider, dan Kopassus secara bersamaan. Hal ini yang tidak terlihat dalam upaya tangani kelompok separatis di Papua. Dugaan saya pemerintah ragu-ragu dengan langkah lebih keras karena khawatir sorotan dunia internasional yang memandang masih adanya kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua," ungkapnya.

Oleh sebab itu Wakil Rakyat asal Yogyakarta ini menyarankan pemerintah untuk melakukan langkah penyelesaian masalah di Papua secara komprehensif dengan membentuk Kementerian atau badan khusus soal Papua.

"Kenaikan dana Otonomi Khusus sebesar 0,25 persen, tidak akan berarti apa-apa jika pemerintah tidak melakukan evaluasi secara total terhadap pelaksanaan otsus dan berbagai langkah yang selama ini dilakukan. Alih-alih bisa selesaikan masalah, kenaikan anggaran bisa memperbesar peluang korupsi berjamaah. Pemerintah harus masuk pada akar masalah dan menyelesaikannya secara tuntas. Dan hal ini bisa dimulai dengan menata kelembagaan secara khusus untuk penanganan Papua," tutup Sukamta.



**H. SUKAMTA, Ph.D.**  
Anggota Komisi I DPR RI

"Korban berjatuh dari pihak TNI masih saja terjadi, ini seakan ada pembiaran dari pemerintah. Seingat saya bulan November lalu ada 1 personil TNI gugur, kemudian masih di bulan ini ada 1 lagi yang gugur. Ini menunjukkan intensitas gangguan kamtibmas yang masih tinggi di Papua. Semestinya ada upaya serius mengatasi hal ini supaya tidak ada lagi korban aparat TNI-POLRI dan juga warga sipil. Kami berharap Pak Menhan Prabowo segera bergerak."

# Wakil Ketua Komisi 1 FPKS: Komcad Sukarela dan Wajib Jaga Netralitas

## KUTIPAN

Jakarta (26/01) — Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Kharis Almasyhari memahami kekhawatiran Koalisi Masyarakat Sipil terkait Komponen Cadangan (komcad) yang akan digunakan pemerintah untuk mengatasi ancaman keamanan dalam negeri.

Pembentukan Komcad, lanjut Abdul Kharis, didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN).

“Peraturan Pemerintah (PP) No.3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2019 tentang PSDN, dimana didalamnya termasuk mengatur tentang pembentukan Komponen Cadangan (Komcad) sebenarnya memang merupakan peraturan pelaksanaan dari pasal-pasal yang diamanatkan oleh UU No.23 Tahun 2019 tentang PSDN.” jelas Kharis dalam keterangan Pers kepada Media

Selasa 26 Januari 2021.

Anggota DPR dari Fraksi PKS menambahkan bahwa terkait pembentukan Komcad sebagaimana diatur dalam PP No.3 Tahun 2021 tersebut, juga sekali tentang sifat sukarela dalam pola rekrutmen Komcad.

“Saya berpendangan bahwa pembentukannya bersifat sukarela, sebagaimana disebutkan pada Pasal 28 ayat (2) UU No.23 Tahun 2019 tentang PSDN. Oleh karenanya, dia tidak boleh diwajibkan kepada seluruh warga negara, kecuali warga negara yang memang atas inisiatif pribadi” jelas Kharis.

Anggota DPR asal Solo ini mengingatkan bahwa saat ini, bangsa kita sedang menghadapi tantangan yang

tidak mudah dalam menangani pandemic covid-19 yang trennya kasus orang yang positif covid-19 terus meningkat tajam. Bahkan bisa menembus angka satu juta kasus. Oleh karenanya, pembentukan Komcad seharusnya mempertimbangkan tantangan untuk menyelesaikan pandemic covid-19, yang sangat rentan mengancam stabilitas keamanan nasional.

“Selain ancaman pandemi Covid-19, ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ke depan adalah masalah kedaulatan, termasuk kedaulatan di ranah siber. Ketahanan siber kita juga sangat lemah. Data-data pribadi masyarakat sangat mudah diretas dan tidak mendapatkan perlindungan secara optimal dari negara. Apabila pembentukan Komcad tidak mempertimbangkan kedua macam ancaman tadi, maka pembentukan Komcad hanya akan menambah beban keuangan negara, tapi minim manfaat” tegas Kharis.

Apabila pembentukan Komcad akan dilakukan, Kharis mendesak agar diatur secara ketat dan harus ada jaminan bahwa hasil rekrutmen Komcad



**Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI**  
Wakil Ketua Komisi I DPR RI

“Saya berpandangan bahwa pembentukannya bersifat sukarela, sebagaimana disebutkan pada Pasal 28 ayat (2) UU No.23 Tahun 2019 tentang PSDN. Oleh karenanya, dia tidak boleh diwajibkan kepada seluruh warga negara, kecuali warga negara yang memang atas inisiatif pribadi”

diisi oleh orang yang memiliki netralitas dan tidak menjadi alat politik kelompok tertentu.

“Saya kira hal ini patut menjadi perhatian mengingat Komcad ini akan dilatih secara

militer. Artinya mereka sebenarnya adalah paramiliter yang dimobilisasi, sehingga harus dikenakan hukum militer dan humanitarian.” tutup Kharis.

# Jaga Kedaulatan NKRI di Perairan Natuna, Toriq: TNI dan Kemhan Harus Tegas pada Pelanggar

## KUTIPAN

Tasikmalaya (25/01) --- Perairan Natuna kembali disorot karena TNI AL kembali menangkap satu kapal asing pada Jumat (22/01/2021). Patroli menggunakan KRI Usman Harun itu diketahui berhasil menangkap kapal bernama Hai Chien Hsing berberedera Taiwan.

Anggota Komisi I dari PKS Toriq Hidayat memberi apresiasi dan dukungan kuat kepada TNI, khususnya TNI angkatan laut yang terus melakukan patroli rutin di wilayah perairan natuna guna menjaga kedaulatan negara dan melakukan penegakan hukum.

"PKS selalu berikan dukungan kuat sekaligus apresiasi kepada upaya TNI yang terus mejaga kedaulatan NKRI khususnya di Perairan Natuna" ungkap Toriq.

Toriq menambahkan, bagi PKS menjaga kedaulatan NKRI di Perairan Natuna adalah

harga mati. Oleh karenanya kapal-kapal berbendera asing yang masuk secara ilegal ke sana harus ditindak tegas. TNI dan Menhan harus siap berkonflik dengan negara-negara yang melanggar kedaulatan NKRI.

"Perkara Kedaulatan NKRI, Menhan dan TNI harus percaya diri, tegas dan berani berkonflik dengan negara manapun bahkan dengan negara yang kita anggap sebagai sahabat sekalipun. Indonesia tidak boleh kehilangan taring hanya karena negara lain tersebut berinvestasi besar di

Indonesia", tegas Toriq.

Menurut Toriq, persahabatan sejati antar negara bukan terbina atas kepentingan semu, misalnya atas dasar jumlah investasi yang paling banyak.

"Melainkan yang bisa saling memahami dan menghormati kedaulatan negaranya masing-masing," tegas Toriq.

Sebelumnya, Kapal bernama Hai Chien Hsing berberedera Taiwan tersebut diduga melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah, menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan aturan.

Di dalam kapal terdapat ikan campuran sebanyak 12 ton dalam 4 palka. Kapal berberedera Taiwan itu diduga melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.



## KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi I DPR RI

"Perkara Kedaulatan NKRI, Menhan dan TNI harus percaya diri, tegas dan berani berkonflik dengan negara manapun bahkan dengan negara yang kita anggap sebagai sahabat sekalipun. Indonesia tidak boleh kehilangan taring hanya karena negara lain tersebut berinvestasi besar di Indonesia"



ABDUL KHARIS

#### Harus bersifat Sukarela

“Saya berpandangan bahwa pembentukannya bersifat sukarela, sebagaimana disebutkan pada Pasal 28 ayat (2) UU No.23 Tahun 2019 tentang PSDN, Oleh karenanya, dia tidak boleh diwajibkan kepada seluruh warga negara, kecuali warga negara yang memang atas inisiatif pribadi”.



SUKAMTA

#### TNI-Polri Harus Kompak

Jangan sampai terkesan Kementerian Pertahanan dan TNI punya massa berbentuk Komduk dan Komcad sedangkan Polri punya massa berbentuk Pam Swakarsa. Pemerintah harus kompak



TORIQ HIDAYAT

#### Perlu sosialisasi

“Walaupun UU pembentukan komcad telah disahkan pada 2019, namun sebagian masyarakat masih banyak yang mempertanyakan apakah pembentukan komcad karena pasukan yang ada tidak mencukupi untuk pertahanan negara?”,

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2021 tentang pelaksanaan UU RI No. 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN).

PP ini menjadi dasar hukum pemerintah dalam merekrut masyarakat untuk menjadi komponen pendukung (komduk) dan komponen cadangan (komcad) yang akan membantu tugas Kementerian Pertahanan dan TNI sebagai komponen utama pertahanan.

# KOMCAD Harus Bersifat SUKARELA



# Positif Covid-19 Capai Satu Juta, Aleg PKS: **Lakukan Lockdown,** Jangan hanya **Andalkan Vaksin**

## KUTIPAN

Jakarta (26/01) — Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera memberi tanggapan mengenai angka kasus Covid-19 yang mencapai satu juta kasus.

Mardani memberi peringatan kepada pemerintah mengenai penanganan Covid-19 yang dianggap masih belum optimal. Pada cuitannya, Mardani memberi saran langsung kepada Presiden Joko Widodo untuk menarik rem darurat dan melakukan lockdown.

Mardani menganggap sikap Pemerintah dalam menanganai Covid-19 masih sangat tidak tegas, sehingga sangat sulit untuk dicontoh oleh masyarakat.

“Sikap setengah-setengah masih terlihat jelas. Paling terbaru adalah masuknya 153 warga China disaat Pak @jokowi membuat aturan agar Warga Negara Asing (WNA) tidak boleh masuk hingga 8 Februari 2021.

Masyarakat sulit taat jika pemerintah masih memberi contoh seperti ini, jangan hanya melihat dari sisi ekonomi atau ketenagakerjaan saja,” ucap Mardani.

Mardani juga merasa sistem vaksinasi perlu diperbaiki terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan tenaga kesehatan masih menemukan beberapa kendala seperti sulitnya registrasi vaksinasi, selain itu semua vaksin Covid-19 belum terbukti mencegah infeksi maupun penularan.

“Akan sulit jika pemerintah hanya mengandalkan vaksin untuk mengatasi pandemi. Jangan lupakan kondisi darurat yang ada di Rumah Sakit (RS) dan tenaga kesehatan kita.

Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan peralatan yang memadai, menambah ICU tanpa memperhatikan hal tersebut akan membebani pasien,” jelas Mardani.

Di akhir, Mardani menyarankan pemerintah untuk mengaktifkan sistem rujukan terintegrasi (Sisrute) yang sudah dijalankan oleh Kementerian Kesehatan sejak 2016, karena Sisrute penting untuk memfasilitasi rujukan pasien Covid-19 yang kian meningkat.

“Di tengah situasi yang menuntut kecepatan, sistem ini bisa menjadi solusi percepatan layanan berbasis digital ketika ada situasi darurat. Terlebih ketika ruang perawatan intensif RS sudah penuh. Selain data tempat tidur, sistem ini juga mampu menampilkan riwayat pasien sebelum tiba sampai pemantauan ambulance terkait posisi dan kondisi pasien,” tutup Mardani.



**Dr. H. MARDANI, M.Eng**

Anggota Komisi II DPR RI

“Akan sulit jika pemerintah hanya mengandalkan vaksin untuk mengatasi pandemi. Jangan lupakan kondisi darurat yang ada di Rumah Sakit (RS) dan tenaga kesehatan kita. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan peralatan yang memadai, menambah ICU tanpa memperhatikan hal tersebut akan membebani pasien.”

Jelang Fit & Proper Test Calon Hakim Agung dan Ad-Hoc

## Aleg PKS: Akan Kami Dalam Rekam Jejak Para Calon

### KUTIPAN

Jakarta (23/01) — Anggota Komisi III dari Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur menanggapi proses pergantian Calon Hakim dan Hakim Ad-Hoc yang akan menjalani fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan.

Pria yang akrab disapa kang Aus ini meyakini bahwa rekam jejak para calon hakim tersebut akan didalami sebagai bagian dari bahan untuk fit and proper test pada Rabu dan Kamis pekan depan.

"Tentu saja rekam jejak dan berbagai informasi yang berkaitan dengan para calon Hakim Agung dan Hakim Ad-Hoc tersebut akan kami dalam," pungkasnya.

Komisi III, lanjut Aus, sudah menjadwalkan dan akan segera melakukan Fit & Proper Test terhadap para calon tersebut.

"InsyaAllah, jika tidak ada perubahan jadwal akan dilaksanakan pada hari Rabu

dan Kamis, 27 dan 28 Januari pekan depan" tuturnya.

Sekarang, imbuhnya, tugas DPR adalah bagaimana memastikan bahwa calon yang diusulkan Komisi Yudisial (KY) layak dan tepat memegang palu Hakim Agung.

"Untuk itulah perlunya dilaksanakan uji kelayakan dan kepatutan ini, mari kita semua mengikuti proses tersebut" imbuh pria yang akrab disapa Kang Aus ini.

Lebih jauh, Kang Aus meminta masyarakat untuk selalu turut mengawal jalannya demokrasi, salah satunya melalui pemantauan terhadap uji kelayakan dan kepatutan ini.

"Saya kira uji kelayakan ini

merupakan salah satu media pembelajaran masyarakat dalam berdemokrasi, untuk itu saya harap masyarakat turut mengawal proses ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar," ujarnya penuh harap.

Sebelumnya, Komisi Yudisial pada 10 Desember 2020 telah menyampaikan surat ke DPR perihal pengajuan nama calon Hakim Agung dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung tahun 2020.

Ada 7 (tujuh) nama calon yang diajukan Komisi Yudisial untuk mendapat persetujuan DPR, yaitu: Dr. Triyono Martanto, S.H., S.E., Ak., CA., M.M., M.Hum sebagai calon Hakim Agung, Banelaus Naipospos, S.H., M.H., Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H., Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H. dan Yarna Dewita, S.H., M.M.

Sebagai calon Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung serta Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H. sebagai calon Hakim Ad Hoc



**KH. AUS HIDAYAT NUR**

Anggota Komisi III DPR RI

"Saya kira uji kelayakan ini merupakan salah satu media pembelajaran masyarakat dalam berdemokrasi, untuk itu saya harap masyarakat turut mengawal proses ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar

Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung.

Berdasarkan jadwal yang dirilis Komisi III, sebelum diselenggarakan uji kelayakan dan kepatutan, terlebih dahulu akan dilakukan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Komisi Yudisial selaku Panel

(Panitia Seleksi) calon Hakim Agung dan Hakim Ad-Hoc pada Senin, (25/01) besok.

Topik yang akan dibicarakan pada RDP tersebut adalah meminta penjelasan ketua KY terkait para calon yang diusulkan tersebut.



# Anggota FPKS Nilai Banjir Kalimantan Bukan Sekedar Curah Hujan, Tapi Ada Masalah **Kerusakan Hutan**

## KUTIPAN

Jakarta (26/01) --- Anggota DPR RI asal Sukabumi dari Fraksi PKS, drh. Slamet, turut berduka cita atas musibah banjir di berbagai daerah termasuk di Kalimantan.

Namun Slamet sangat menyayangkan, pernyataan pemerintah bahwa banjir yang melanda di Kalimantan disebabkan murni akibat faktor alam yakni curah hujan yang sangat tinggi dan gelombang laut yang tinggi mencapai 2,5 meter.

"Bencana yang ada ini seharusnya tidak dapat kita nyatakan karena faktor alam semata. Namun ada hal besar yang membuat bencana ini semakin hebat dikarenakan faktor lingkungan yang semakin berubah. Pertama karena pola pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Kerusakan hutan banyak terjadi sehingga kemampuan lahan menahan dan menyerap air sangat rendah", tutur Slamet.

Politisi PKS ini mencatat tidak kurang dari 23 juta hektar

hutan Indonesia mengalami kerusakan dan beralih fungsi selama periode tahun 2000 hingga 2017.

"Hutan di Kalimantan berkurang lebih dari 8 juta hektar, hutan di Sumatera 6 juta hektar dan pulau Jawa tersisa 1 juta hektar hutannya," ungkapnya.

Anggota Komisi IV di DPR ini mengatakan, keadaan lingkungan yang berubah secara simultan dari tahun ke tahun ini akan menjadi bom waktu bencana alam. Banjir yang terjadi saat ini adalah awal mula peringatan bagi negara ini. Karena Bencana lebih besar seperti perubahan Iklim yang diikuti bencana-bencana lain akan menanti di masa yang akan datang.

"Sudah saatnya negara kita serius menghentikan laju

deforestasi di berbagai area hutan kita. Di Masa yang akan datang, pengelolaan hutan yang tepat harus dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang lestari yang bukan saja mengembalikan fungsi-fungsi perbaikan lingkungan, tetapi secara bersamaan juga dapat memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat", saran Slamet.

Slamet mengungkap data bank dunia yang menyatakan adanya kerugian negara sebesar US\$ 4 milyar per tahun akibat berbagai bencana di tanah air. Pemicu utama bencana ini adalah adanya pembalakan liar yang terjadi secara masif dari tahun ke tahun. Sementara pemerintah hanya memungut US\$ 300 juta per tahun dari aktifitas pengelolaan hutan, yang berarti negara ini telah mengalami kerugian berlipat berupa rendahnya penerimaan negara dari aktivitas hutan sekaligus menanggung biaya recovery akibat kerusakan hutan.



**drh. H. SLAMET**  
Anggota Komisi IV DPR RI

“Sudah saatnya negara kita serius menghentikan laju deforestasi di berbagai area hutan kita. Di Masa yang akan datang, pengelolaan hutan yang tepat harus dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang lestari yang bukan saja mengembalikan fungsi

# Legislator PKS Minta Pemerintah Tidak Kurangi Anggaran Sektor Pertanian

## KUTIPAN

Pemotongan tersebut akan berdampak luas pada pembangunan sektor pertanian, target stok pangan nasional, swasembada pangan dan nilai tukar petani.

Jakarta (25/01) — Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Hermanto mengatakan, refocusing dan realokasi anggaran tidak mesti disertai pemotongan anggaran pada sektor pertanian.

Pemotongan tersebut, kata Hermanto, akan berdampak luas pada pembangunan sektor pertanian, target stok pangan nasional, swasembada pangan dan nilai tukar petani.

"Kenaikan harga kedelai dan daging yang terjadi saat ini berdampak pada harga produk turunan nya, seperti; tempe, tahu, bakso, sate, soto, biaya tenaga kerja, biaya angkut dll. Kenaikan harga umum secara simultan pada harga berbagai produk pangan akan memicu inflasi akan menyebabkan semakin rendahnya daya beli masyarakat. Dalam

menghadapi kondisi kenaikan harga pangan tersebut, maka tidaklah tepat pemerintah melakukan pemotongan anggaran sektor pertanian," papar Hermanto menanggapi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang menyampaikan rencana Pemerintah memotong anggaran sektor pertanian sebesar 6,3 triliun dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Kementerian Pertanian, Senin (25/01).

Hermanto mendesak Pemerintah agar membuat strategi alternatif mencari sumber dana untuk mengatasi keterbatasan anggaran.

"Sumber dana alternatif itu misalnya berasal dari dana yang mengendap di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan di Badan Layanan Umum (BLU) atau dana

lain yang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan," tutur legislator Fraksi PKS ini

Pembangunan sektor pertanian, katanya, sangat strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan serta meminimalkan importasi pangan.

"Karena hal tersebut, mestinya pemotongan anggaran sektor pertanian tidak boleh dilakukan," tandas Hermanto.



**Dr. HERMANTO, S.E., M.M.**  
Anggota Komisi IV DPR RI

"Kenaikan harga kedelai dan daging yang terjadi saat ini berdampak pada harga produk turunan nya, seperti; tempe, tahu, bakso, sate, soto, biaya tenaga kerja, biaya angkut dll. Kenaikan harga umum secara simultan pada harga berbagai produk pangan akan memicu inflasi akan menyebabkan semakin rendahnya daya beli masyarakat. Dalam menghadapi kondisi kenaikan harga pangan tersebut, maka tidaklah tepat pemerintah melakukan pemotongan anggaran sektor pertanian

## Anggaran Kementerian Pertanian Dipotong untuk Vaksin

# Johan: Vaksin Terbaik Adalah Pangan yang Cukup

### KUTIPAN

Jika anggaran Kementerian Pertanian RI sebanyak Rp 6 triliun dipotong untuk vaksin, sama dengan meracuni vaksin itu sendiri.

Jakarta (25/01) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan mempersoalkan pemotongan anggaran Rp 6 triliun Kementerian Pertanian RI untuk vaksin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 oleh Kementerian Keuangan RI.

Politisi PKS tersebut mengungkapkan bahwa vaksin terbaik adalah yang bersumber dari ketersediaan pangan yang terkendali.

"Pertama, saya ingin sampaikan bahwa vaksin terbaik itu adalah pangan yang cukup, ada, dan terjangkau," kata Johan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Senin (25/01).

Ia menegaskan, jika anggaran Kementerian Pertanian RI sebanyak Rp 6 triliun dipotong untuk vaksin, sama dengan meracuni vaksin itu sendiri.

Maka, legislator dari dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I ini mendorong kepada Menteri Pertanian dan Komisi IV DPR RI agar menganggap kebijakan tersebut sebagai gangguan kolektif.

"Karenanya, saya ingin ada kesimpulan di dalam rapat itu, bahwa Komisi IV dan Menteri Pertanian terganggu dengan pemotongan anggaran 6 triliun ini," jelasnya.

Ia pun memastikan keberpihakannya terhadap petani, dan menyesalkan pembahasan dalam rapat

tersebut terkait pangan yang dinilai tidak mendukung implementasinya.

"Kalau saya jadi menteri, saya pertaruhkan untuk petani anggaran 6 triliun ini. Percuma omongan-omongan tinggi kayak tadi itu kalau anggaran kita dipotong 7 triliun. Bicara tentang peningkatan produksi, bicara tentang ini, bicara tentang itu, (tapi) kita potong anggaran kita," pungkasnya.



Kalau saya jadi menteri, saya pertaruhkan untuk petani anggaran 6 triliun ini. Percuma omongan-omongan tinggi kayak tadi itu kalau anggaran kita dipotong 7 triliun. Bicara tentang peningkatan produksi, bicara tentang ini, bicara tentang itu, (tapi) kita potong anggaran kita



**H. JOHAN ROSIHAN, S.T**

Anggota Komisi IV DPR RI

# PKS Mengkritisi dan Meminta Pemerintah Serius Mencegah Laju Deforestasi Hutan di Indonesia yang Menyebabkan Bencana Alam & Banjir Bandang

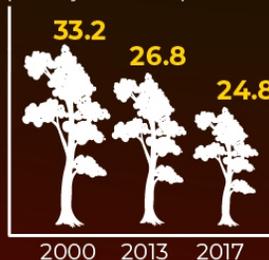


FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

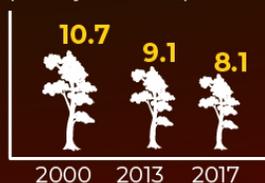
Luas Hutan  
**SUMATERA**  
(dalam juta hektare)



Luas Hutan  
**KALIMANTAN**  
(dalam juta hektare)



Luas Hutan  
**SULAWESI**  
(dalam juta hektare)



Luas Hutan  
**MALUKU**  
(dalam juta hektare)



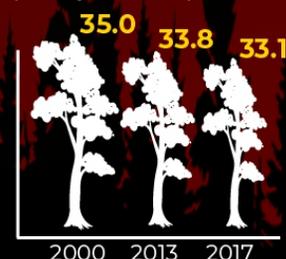
Luas Hutan  
**JAWA**  
(dalam juta hektare)



Luas Hutan  
**BALI NUSRA**  
(dalam juta hektare)



Luas Hutan  
**PAPUA**  
(dalam juta hektare)



# Aleg PKS **Sayangkan** Kebijakan Impor Daging Sapi Jadi Solusi Atasi Mahalnya Harga

## KUTIPAN

Jakarta (24/01) — Anggota DPR RI asal Sulawesi Selatan II dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin sangat menyayangkan, hingga saat ini, Pemerintah masih mengandalkan impor sebagai solusi Mengatasi lonjakan harga daging sapi.

Saat ini, kata Akmal, pihaknya terus memantau perkembangan di lapangan dan informasi yang didapat dari berbagai media bahwa daging sapi di awal tahun 2021 ini menjadi polemik di Tanah Air.

"Jabotabek menjadi kawasan sentral dinamisasi harga daging sapi sempat membuat reaksi mogok bagi pedagang daging sapi untuk menjual produknya," ungkapnya.

Saat ini, imbuhnya, kita terlalu bergantung impor daging sapi. Terutama dari Australia sebagai pemasok terbesar daging sapi di Tanah Air.

"Ketika Australia menahan komoditas daging sapi akibat regenerasi populasi, maka

Negara kita terimbas. Ini menunjukkan bertahun-tahun upaya negara menjadikan daging sapi berdaulat di negeri sendiri, hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilannya", tutur Akmal.

Politisi PKS ini menerangkan, bahwa upaya untuk mewujudkan swasembada daging sapi ini sudah dilakukan sejak 15 tahun silam, yakni sejak periode pertama pemerintahan SBY.

"Namun segala upaya dengan dukungan APBN yang ada mewujudkan swasembada daging sapi ini seakan sia-sia," pungkasnya.

Padahal, kata Akmal, program-program seperti penyelamatan induk sapi

(penyelamatan sapi produktif), memperkuat kualitas genetik sapi, program 1000 desa sapi, hingga program UPPO (Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik) telah dilakukan.

"Indonesia saat ini masih tidak kuasa menghadapi persoalan suply demand (ketersediaan dan permintaan) daging sapi karena infrastruktur pengembangan sapi kita belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri. Dari sisi lahan, negara kita masih terbuka luas. Bahkan sinergi Sapi Sawit masih dapat di optimalkan lebih dalam lagi", jelas Akmal.

Anggota Komisi IV DPR ini sudah menduga, bahwa solusi impor pun tetap akan dilakukan dalam waktu dekat ini terutama alternatif mencari suplier dari negara lain seperti India, Brazil bahkan dari Meksiko.

Akmal mengatakan, Pemerintah saat ini memang mesti mempersiapkan beberapa moment besar yang mempengaruhi perilaku masyarakat Indonesia. Salah satunya Ramadhan yang bersambung leduh Fitri dimana



**Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M**

Anggota Komisi IV DPR RI

Pemerintah saat ini memang mesti mempersiapkan beberapa moment besar yang mempengaruhi perilaku masyarakat Indonesia. Salah satunya Ramadhan yang bersambung leduh Fitri dimana moment ini sangat mempengaruhi perilaku konsumen masyarakat Indonesia terutama pada permintaan daging sapi.

moment ini sangat mempengaruhi perilaku konsumen masyarakat Indonesia terutama pada permintaan daging sapi.

"Saya meminta kepada pemerintah, Marilah kita mulai untuk serius mempersiapkan

infrastruktur mewujudkan swasembada daging sapi ini. Ini adalah kerjaan jangka panjang, tapi mesti ada target.

Seharusnya 10 tahun cukup untuk mewujudkan ini bila memang betul-betul serius", tutup Andi Akmal Pasluddin.



# Kok Bisa WNA China Masuk RI Padahal Lockdown?

- Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Sigit Sosiantomo, mempertanyakan kedatangan ratusan WNA asal China di Bandara Soetta padahal RI Perpanjang Larangan Masuk WNA hingga Februari mendatang.

"Kok bisa ini ratusan WNA asal China masuk RI lewat Soetta padahal larangan masuk diperpanjang? Seharusnya Kemenhub melalui otoritas bandara (otban) memperketat semua penerbangan internasional," kata Sigit

Ket. Foto: Petugas saat melakukan pemeriksaan kesehatan kepada 61 warga negara China di Bali sebelum masuk pesawat, Sabtu (8/2).  
(Dok. Angkasa Pura I)

99 KUTIPAN

Seharusnya otoritas bandara mentaati aturan yang sudah ditetapkan satgas penanganan covid 19 dengan menutup sementara perjalanan WNA ke Indonesia kecuali bagi kunjungan resmi pejabat setingkat menteri ke atas dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat



**Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO**  
Anggota Komisi V DPR RI

# Anggota Komisi V Fraksi PKS: Kok Bisa WNA China Masuk RI Padahal Lockdown?

## KUTIPAN

Jakarta (26/01) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Sigit Sosiantomo, mempertanyakan kedatangan ratusan WNA asal China di Bandara Soetta padahal RI Perpanjang Larangan Masuk WNA hingga Februari mendatang.

"Kok bisa ini ratusan WNA asal China masuk RI lewat Soetta padahal larangan masuk diperpanjang? Seharusnya Kemenhub melalui otoritas bandara (otban) memperketat semua penerbangan internasional," kata Sigit.

Sigit mengatakan seharusnya otoritas bandara mentaati aturan yang sudah ditetapkan satgas penanganan covid 19 dengan menutup sementara perjalanan WNA ke Indonesia kecuali bagi kunjungan resmi pejabat setingkat menteri ke atas dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat.

"Sesuai dengan pernyataan Menlu, hanya kunjungan resmi pejabat

setingkat menteri ke atas yang diijinkan masuk. Tapi mengapa untuk TKA China kita memperbolehkan. Dan ini bukan yang pertama, sejak ditutup dari awal Januari sampai sekarang mungkin sudah ribuan yang masuk ke RI lewat berbagai bandara," kata Sigit.

Untuk itu, Sigit meminta Kemenhub menyelidiki kasus masuknya TKA asal China tersebut. Menurut Sigit, tak hanya untuk mencegah meluasnya penyebaran covid, tapi juga sebagai bentuk menjaga kedaulatan negara.

"Sesuai dengan pasal UU Penerbangan, Otban memiliki otoritas untuk mengatur semua kegiatan di bandara, termasuk

koordinasi dibidang pemerintahan. Dan ini bukan hanya untuk mencegah masuknya covid varian baru, tapi juga menjaga kedaulatan negara. Jangan sampai kita tunduk pada asing," Kata Sigit yang juga mantan Wakil Ketua Komisi V DPR RI.

Seperti diketahui, belum lama ini sempat viral dimedia 153 TKA China masuk dari Soetta, padahal RI perpanjang larangan masuk WNA.

Sebelumnya, pada hari pertama pelarangan WNA masuk RI pada 1 Januari, ada 1.700 orang dari rute internasional yang diloloskan masuk ke Indonesia. Padahal, ada aturan pelarangan masuk WNA dari seluruh negara ke Indonesia dari Satgas Penanganan Covid 19.

**Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO**  
Anggota Komisi V DPR RI

"Sesuai dengan pernyataan Menlu, hanya kunjungan resmi pejabat setingkat menteri ke atas yang diijinkan masuk. Tapi mengapa untuk TKA China kita memperbolehkan. Dan ini bukan yang pertama, sejak ditutup dari awal Januari sampai sekarang mungkin sudah ribuan yang masuk ke RI lewat berbagai bandara."

# Anggota FPKS Dorong Pemerintah Atasi Kelangkaan Daging Sapi dan Harga yang Terus Naik!

## KUTIPAN

Jakarta (23/01) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mahfudz Abdurrahman, menanggapi protesnya para pedagang daging sapi di pasar-pasar, dan mengancam mogok berdagang, yang disebabkan oleh sangat mahalnya harga daging sapi.

Menurut Mahfudz, Alasan yang diungkapkan sangat masuk akal, yakni harga daging sapi sudah sangat mahal dan modal yang dikeluarkan makin besar.

"Yang beli pasti makin sedikit, ujungnya semua akan rugi. Ini harus disikapi serius oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian," ungkap Mahfudz yang merupakan Komisi VI DPR RI ini.

Pria yang kerap disapa Mahfudzi ini menambahkan kenaikan harga daging sapi dan kelangkaan di pasaran sudah sering sekali terjadi.

"Kita ini tidak juga bisa keluar dari persoalan rantai pasok (supply chain) kebutuhan pangan, masalah selalu

berulang. Saat pasokan over alias berlebih, harga jatuh. Saat pasokan menipis, otomatis harga makin mahal. Padahal saya yakin semua bisa diperkirakan, diperhitungkan dan diantisipasi. Ini membuat miris kita semua," ucap Anggota DPR RI yang mewakili Kota Depok dan Kota Bekasi.

Mahfudz melanjutkan, banyak pedagang yang mengeluh, mengapa harga daging sapi tidak juga turun, padahal puasa dan lebaran masih lumayan lama.

"Pedagang daging pun mengeluh, mereka bingung kenapa pasokan daging tidak ditambah?, padahal harga daging sudah tidak wajar lagi sejak lama," pungkasnya.

Sekarang ini, imbuhnya, harga daging sapi sudah mencapai 130 ribu, bahkan 140 ribu perkilo. Sudah sangat tidak wajar, dimana yang wajar dikisaran 100 ribu perkilo.

"Dapil saya di Kota Depok dan Kota Bekasi, Dapil perkotaan. Ribuan pelaku usaha yang menggunakan daging sapi dalam usahanya, mereka yang terkena dampak mahalnya harga daging sapi. Termasuk ibu-ibu rumah tangga," urainya.

Pihaknya meminta jajaran Pemerintah terkait, baik di pusat dan di daerah agar membuat langkah nyata. Persoalan mahalnya harga daging sapi bisa segera terselesaikan.

"Kami di DPR RI akan meminta pertanggungjawaban Pemerintah, dalam hal ini mitra Komisi VI yaitu Kementerian Perdagangan," tegas Bendahara Umum DPP PKS ini.

Mahfudz juga meminta, jajaran penegak hukum untuk mencari tahu kenapa daging sapi makin langka dan ujungnya harga makin mahal.

"Untukantisipasi saja, ja-



**H. MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos**  
Anggota Komisi VI DPR RI

**"Kita ini tidak juga bisa keluar dari persoalan rantai pasok (supply chain) kebutuhan pangan, masalah selalu berulang. Saat pasokan over alias berlebih, harga jatuh. Saat pasokan menipis, otomatis harga makin mahal."**

ngan-jangan ada pihak yang bermain. Sehingga meraup untung besar atas mahalnya harga daging sapi. Kalau ternyata benar ada, harus ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Supaya jera dan kapok," ucap Anggota Legislatif ini.

Tak hanya itu, Mahfudzi juga meminta Pemerintah Pusat untuk memperbanyak operasi pasar daging sapi, terutama di pasar-pasar tradisional.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Legislator PKS Tegaskan Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku UMKM Harus Dipermudah

## KUTIPAN

Jakarta (21/01) --- Anggota Komisi VI Fraksi PKS DPR RI, Rafli menegaskan Pemerintah untuk memberikan kemudahan bantuan kepada pelaku UMKM

Sebagai bentuk upaya agar pelaku usaha dapat adaptif terhadap keadaan pandemi.

Rapat Komisi VI sendiri membahas upaya Pemerintah membantu situasi sulit bagi pelaku UMKM di tengah masa pandemi Covid -19 yang memaksa mereka beradaptasi.

Menanggapi hasil rapat tersebut, anggota Komisi VI Fraksi DPR RI, Rafli menyampaikan bahwa kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah harus dapat menyentuh persoalan yang ada di masyarakat, khususnya UMKM.

"Yang lebih utama, bagaimana masyarakat dapat beradaptasi dengan kondisi dengan bantuan kebijakan - kebijakan dari Pemerintah."

Ucap Rafli.

Bantuan tersebut, kata Rafli, diperuntukkan untuk menjaga produktifitas pelaku UMKM yang nantinya akan berdampak kepada bagaimana pelaku usaha dapat beradaptasi dengan keadaan pandemi.

"Melalui permasalahan situasi yang ada, kebijakan Pemerintah melalui bantuan yang diberikan kepada masyarakat akan berpengaruh kepada kinerja UMKM," tegas Rafli.

Rafli menambahkan, Komisi VI mendorong supaya bantuan dari pemerintah kepada masyarakat harus dapat dipermudah supaya masyarakat bisa terus produktif menjalankan usaha di tengah kondisi yang ada.



## RAFLI

Anggota Komisi VI DPR RI



kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah harus dapat menyentuh persoalan yang ada di masyarakat, khususnya UMKM. Yang lebih utama, bagaimana masyarakat dapat beradaptasi dengan kondisi dengan bantuan kebijakan - kebijakan dari Pemerintah."



# Anggota FPKS Nilai Proses Holding BUMN UMKM Minim Sosialisasi

## KUTIPAN

Jakarta (21/01) — Anggota Komisi VI dari Fraksi PKS, Amin Ak mendesak Kementerian BUMN segera mensosialisasikan kembali rencana pembentukan holding BUMN UMKM antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Pegadaian.

Amin menilai, kurangnya sosialisasi baik roadmap maupun progres pembentukan holding memunculkan informasi yang simpang siur dan kontraproduktif.

“Sosialisasi yang minim membuat banyak pihak terkait resah dan bertanya-tanya, terutama nasabah kecil yang selama ini terbiasa dan tergantung pada layanan PNM dan Pegadaian. DPR juga kesulitan lakukan pengawasan terhadap proses yang berlangsung,” tegas Amin usai menerima aspirasi dari Serikat Pekerja Pegadaian, secara virtual, Rabu malam (20/01/2021).

Lebih lanjut Amin mendesak agar proses holding ketiga BUMN tersebut transparan dan tidak dibelokkan menjadi

akuisisi atau peleburan. Menurut Amin, strategi akuisisi tidak tepat dikarenakan masing-masing perusahaan memiliki intensitas, karakteristik, dan budaya yang berbeda.

Selain itu, lanjut Amin, akuisisi itu lebih tepat diberlakukan pada perusahaan yang kondisinya tidak sehat agar menjadi sehat. Sedangkan PNM dan Pegadaian merupakan dua BUMN berkinerja sangat baik, sangat sehat, dan mampu berkontribusi besar bagi penerimaan negara lewat dividen maupun pajak.

Berdasarkan laporan keuangan PT Pegadaian persero, tahun 2019 PT Pegadaian menyetorkan dividen sebesar Rp1,388 triliun, membukukan laba bersih

setelah pajak sebesar Rp3,11 triliun, dan nilai ekuitas Rp 23,06 triliun. Bahkan di masa pandemi pun masih mampu menunjukkan kinerja positif.

Berdasarkan laporan per 31 Juni 2020, mampu mencatatkan dividen sementara sebesar Rp1,01 triliun, laba bersih Rp2,78 triliun, dan nilai ekuitas Rp24,21 triliun.

“Logikanya, pembentukan holding ini kan harus menguntungkan semua pihak. Perusahaan yang sudah berkinerja baik seperti PNM dan Pegadaian diharapkan kerjanya menjadi jauh lebih baik lagi setelah pembentukan holding bukan malah sebaliknya,” tutur Wakil Rakyat asal Jatim IV (Kabupaten Jember dan Lumajang) itu.

Amin menyontokkan holding yang dibentuk pada BUMN perkebunan yang masih mempertahankan misi dan karakteristik bisnis perusahaan masing-masing. Holding diperlukan untuk membangun sinergi dan memperkuat masing-masing perusahaan. Yang sakit dibuat jadi sehat dan yang sehat dibuat lebih baik kerjanya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**AMIN AK, M.M.**  
Anggota Komisi VI DPR RI

“Sosialisasi yang minim membuat banyak pihak terkait resah dan bertanya-tanya, terutama nasabah kecil yang selama ini terbiasa dan tergantung pada layanan PNM dan Pegadaian. DPR juga kesulitan lakukan pengawasan terhadap proses yang berlangsung

# Politisi PKS Nilai Banpres Produktif Usaha Mikro Harus Diteruskan dengan Pengawasan Ketat

## KUTIPAN

Jakarta (25/01) — Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina mengatakan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) sangat baik karena telah terbukti selama satu tahun ini mampu membangkitkan pelaku UMKM

Namun Nevi memberikan beberapa catatan, berkaitan dengan penggunaan uang negara untuk masyarakat ini.

"Laporan evaluasi BPUM 2020, ada 44,8% UMKM yang kapasitas dan kinerja meningkat, serta 51,5% UMKM usahanya kembali beroperasi," ungkapnya.

Nevi meminta agar anggaran besar yang mencapai triliunan ini, jangan sampai hanya sekedar seremoni tanpa ada substansi.

"Penerima manfaat BPUM harus tepat sasaran. Ada 12 juta penerima BPUM 2020. Pemerintah harus memiliki data yang kuat dan memastikan validasinya pada penerima bantuan. Ini sangat penting

agar penerima manfaat bantuan dari Pemerintah benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai bantuan ini dimanfaatkan oleh pihak tertentu karena adanya persoalan data yang tidak tepat" urai Nevi.

Nevi memperhatikan, bahwa Bantuan tersebut merupakan insentif yang akan diberikan kepada 12 juta pelaku usaha mikro, dengan nilai bantuan sebesar Rp2,4 juta per penerima manfaat.

"Komisi VI telah membuat keputusan, bahwa Komisi VI DPR RI mendukung usulan Kementerian Koperasi dan UKM untuk melaksanakan Program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) Tahun

2021 sebesar Rp28.800.000.000.000,- (Dua Puluh Delapan Triliun Delapan Ratus Miliar Rupiah) yang diperuntukan bagi 12 (dua belas) juta pelaku usaha mikro dengan perbaikan sistem pelayanan agar lebih mudah dan tepat sasaran," paparnya.

Kami di DPR, lanjut Nevi, sangat meminta dengan tegas agar Kementerian Koperasi dan UKM dapat merealisasikan pelaksanaan anggaran secara transparan, tepat sasaran dan tepat guna sesuai dengan prinsip Good Governance dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Saya mengingatkan Pemerintah, agar ketepatan sasaran pada penyaluran BPUM ini tidak mudah. Selain persoalan data yang perlu validasi terus menerus, juga pada persolan proses penyalurannya," urainya.

Berdasarkan data BPS pada tahun 2018, imbuhnya, ada sebanyak 64.199.606 unit pelaku usaha di Indonesia. Dari total pelaku usaha tersebut jumlah UMKM yang ada sebesar 99,99%, jauh lebih



**Hj. NEVI ZUAIRINA**  
Anggota Komisi VI DPR RI

**“Saya mengingatkan Pemerintah, agar ketepatan sasaran pada penyaluran BPUM ini tidak mudah. Selain persoalan data yang perlu validasi terus menerus, juga pada persolan proses penyalurannya.”**

besar dibandingkan dengan jumlah pelaku Usaha Besar yang hanya 0,001%.

"Namun sayangnya sebagian besar pelaku UMKM masih belum mengakses layanan perbankan dan

lembaga pembiayaan formal lainnya, hanya ada sekitar 20% dari total pelaku UMKM yang sudah familiar terhadap Perbankan," terang Nevi.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



”

**Saudaraku,  
seluruh keluarga besar PKS  
harus tetap menjaga etika dalam  
bersosmed, jangan hoax ,  
jangan fitnah dan jangan gunakan  
kata-kata kasar atau kotor, Walau  
dituduh dan dipancing-pancing,  
Kita harus tetap yakin  
kebenaran adalah sebuah  
kebaikan sampai  
akhir zaman**

**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**

Ketua Fraksi PKS DPR RI



# DPR Minta BPH Migas Percepat Program Digitalisasi SPBU

## ● KUTIPAN

Saadiah juga mendesak kepada kepala BPH Migas untuk secara serius meningkatkan pengawasan kepada PT Pertamina (Persero) agar meminimalisir losses di setiap SPBU

Maluku (27/1) - Anggota Komisi VII DPR RI Saadiah Uluputty meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) agar meningkatkan koordinasi dengan PT Pertamina (Persero) untuk segera melakukan penyelesaian program digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) dalam rangka pengawasan dan pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM). Termasuk pemasangan Automatic Tank Gauge (ATG), Electronic Data Capture (EDC), serta CCTV Analytic.

"Kami minta ada pelatihan

dan sosialisasi yang benar tentang sistem digitalisasi ini kepada pengelola SPBU agar tujuan digitalisasi ini dapat tercapai dengan baik sesuai yang diharapkan. Bagaimana sistem pemeliharaan alat digitalisasi di SPBU? " tanya Saadiah saat rapat kerja dengan BPH Migas pada hari Rabu (27/1) di Gedung DPR RI.

Anggota DPR asal Maluku ini menambahkan, biasanya yang terjadi alat digitalisasi tersebut akan rusak dan tidak ada tindak lanjut karena tidak ada pemeliharannya. namun dirinya justru menyangkan mengapa terjadi resistensi dari pengusaha SPBU terhadap sistem digitalisasi.

"Kami meminta BPH Migas mengejar target realisasi BBM 1 harga karena di daerah progressnya masih rendah. Selain harga, ketersediaan stock juga penting, khususnya daerah kepulauan sering terjadi kelangkaan BBM" tegas Saadiah.

Saadiah juga mendesak kepada kepala BPH Migas untuk secara serius meningkatkan pengawasan kepada PT Pertamina (Persero) agar meminimalisir losses di setiap SPBU. Selain itu dirinya

juga meminta agar program BBM 1 harga ditambah di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) agar percepatan ketersediaan dan distribusi BBM di masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi dan untuk meningkatkan pengawasan dalam proses pelaksanaan penyalur BBM satu harga.

**SAADIAH ULUPUTTY, S.T**

Anggota Komisi VII DPR RI

Kami minta ada pelatihan dan sosialisasi yang benar tentang sistem digitalisasi ini kepada pengelola SPBU agar tujuan digitalisasi ini dapat tercapai dengan baik sesuai yang diharapkan. Bagaimana sistem pemeliharaan alat digitalisasi di SPBU?



# Aleg FPKS Minta Pemerintah Serius **Tingkatkan** Alokasi Gas Dalam Bauran Energi Nasional

**KUTIPAN**

Jakarta (27/01) — Anggota Fraksi PKS DPR RI, Rofik Hananto menilai, meski ada tren penurunan, cadangan gas bumi di Indonesia pada dasarnya masih sangat melimpah.

Karena itu, kata Rofik, Pemerintah diminta untuk meningkatkan porsi gas dalam bauran energi nasional.

"Penting bagi pemerintah untuk meningkatkan porsi gas dalam bauran energi nasional. Karena gas adalah energi fosil yang paling bersih dan cocok untuk menjembatani transisi bauran energi Indonesia ke depan," ungkap Rofik Hananto saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Dirut PT PGN Tbk, Rabu (27/01/2021).

Rofik menambahkan, harga murah dan ketersediaan pasokan merupakan keunggulan gas bumi ketimbang sumber lain.

"FPKS mendorong PGN terus mengoptimalkan gas bumi

di dalam negeri sebagai economic drive disaat pandemi," pungkasnya.

Selain itu, FPKS meminta PGN melaksanakan program prioritas 2021 dengan lebih serius dan sesuai target. Karena program prioritas PGN setiap tahun hampir sama yang berbeda hanya soal penambahan nilai target saja.

"Oleh karena itu meski ada pandemi PGN harus terus melaksanakan inovasi agar mampu meningkatkan ketahanan layanan, efisiensi, dan tingkat layanan lebih baik dari tahun ke tahun," ujar legislator asal Kabupaten Purbalingga itu.

Sementara terkait program Jaringan Gas (Jargas), sampai dengan saat ini, pelanggan PGN

yang telah beroperasi sebanyak 422.153 SR dari total Jargas 537.936 SR.

PGN akan mengoptimalkan pembangunan Jargas mandiri, bersumber dari APBN 2021 dan KPBU, sehingga dapat mencapai pengelolaan sesuai dengan target Proyek Strategis Nasional.

"FPKS mendorong dan mengawal program Jargas PGN terutama untuk kepentingan ekonomi dengan memberi support kepada industry retail dalam memberi solusi dalam situasi pandemi saat ini," kata Wakil Rakyat dari Dapil Jawa Tengah VII itu.

Menurut dia, harga murah tentu menjadi variabel positif bagi pelaku industri dan rumah tangga dalam bentuk jaringan gas. Bagi pelaku industri rumah tangga, misalnya, belanja energi yang miring akan signifikan mengurangi beban pokok produksi.

Lebih lanjut Rofik mengatakan, FPKS menuntut kehati-hatian Pemerintah dalam melakukan rencana mengevaluasi penetapan harga gas US\$ 6 per MMBTU, khususnya bagi 7 industri

**H. ROFIK HANANTO, S.E.**

Anggota Komisi VII DPR RI

"FPKS menuntut kehati-hatian Pemerintah dalam melakukan rencana mengevaluasi penetapan harga gas US\$ 6 per MMBTU, khususnya bagi 7 industri khusus yang tidak memberikan efek ganda dan tidak memiliki performa bagus seperti yang diharapkan. Karena FPKS melihat kondisi pandemi Covid-19 yang menghantam seluruh industri, membuat keputusan evaluasi kebijakan harga gas industri harus dikaji ulang."

khusus yang tidak memberikan efek ganda dan tidak memiliki performa bagus seperti yang diharapkan.

"Karena FPKS melihat

kondisi pandemi Covid-19 yang menghantam seluruh industri, membuat keputusan evaluasi kebijakan harga gas industri harus dikaji ulang," tegasnya

# Kebutuhan Gas, Tifatul: Siapa yang Feeding Data ke Dirut Pertamina?

## KUTIPAN

Jakarta (23/01) --- Sejumlah anggota Komisi VII DPR menyoroiti kasus gugatan perjanjian jual beli gas alam cair antara Anarkado Petroleum Corporation dan PT Pertamina (Persero).

Anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring mempertanyakan data kebutuhan gas dalam negeri yang disodorkan ke Pertamina.

Pasalnya, terjadi perbedaan data antara pasokan dan kebutuhan gas di dalam negeri sehingga terjadinya kesalahan dalam perjanjian jual beli itu.

"Ini sering terjadi di kementerian, ini yang feeding data ke Dirut Pertamina siapa? Kenapa dikatakan 2025 sangat kekurangan gas," katanya dalam rapat kerja dengan Menteri ESDM, Selasa (19/1/2021).

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Gerindra Kardaya Warnika

menilai kontrak yang ditandatangani Pertamina berdasarkan kebutuhan gas dalam negeri. Untuk itu, pemerintah perlu turun tangan dalam menyelesaikan kasus itu.

Di sisi lain, Pertamina justru mendapatkan gugatan dari Anadarko karena pembatalan perjanjian jual beli gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG).

"Jangan dibiarkan berjalan sendiri bantu Pertaminaolong Pertamina agar tidak kena tuntutan Rp39,5 triliun," kata mantan Kepala BP Migas (kini SKK Migas) tersebut.

Pertamina dikabarkan tengah tersangkut masalah pembelian gas alam cair dengan Anadarko. Masalah itu sebagai buntut dari pemba-

nalan perjanjian jual beli yang dilakukan pada awal tahun lalu.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Bisnis, pada Februari 2020 Pertamina telah menandatangani perjanjian jual beli dengan Anadarko Petroleum Corporation untuk pembelian LNG dari Mozambik LNG1 Company Pte. Ltd. yang merupakan entitas penjualan bersama yang dimiliki dari Mozambik Area 1 co-venturer. Adapun kesepakatan tersebut untuk 1 juta ton per tahun dengan jangka waktu 20 tahun.

Adapun pembelian gas ini rencananya untuk kebutuhan domestik, yang mayoritas digunakan untuk listrik dan refinery development master plan.



**Ir. H. TIFATUL SEMBIRING**

Dapil Sumatera Utara I

Ini sering terjadi di kementerian, ini yang feeding data ke Dirut Pertamina siapa? Kenapa dikatakan 2025 sangat kekurangan gas



Ada Keanihan Terkait Perpres BRIN

# Aleg PKS: Tinggal Masuk Lembar Negara, Dikembalikan ke Sekneg

## KUTIPAN

Jakarta (21/01) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, mempertanyakan alasan Menkumham Yassona Laoly menunda memasukan Perpres Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ke Lembar Negara Republik Indonesia

Akibat penundaan tersebut, kata Mulyanto, Perpres belum bisa diundangkan dan pembentukan kelembagaan BRIN belum dapat dilaksanakan.

"Saya heran kenapa Menkumham mengulur-ulur waktu mengundangkan Perpres ini padahal Perpres sudah disetujui Kementerian PAN & RB, bahkan sudah ditandatangani oleh Presiden Jokowi," tandasnya.

Dengan kelengkapan seperti itu, imbuh Mulyanto, harusnya Menkumham langsung dapat memasukan Perpres BRIN ke dalam Lembar Negara bukan malah dikembalikan ke Sekretariat Negara.

"Saya menilai Presiden seperti disandera oleh anak

buahnya terkait penerbitan Perpres Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini. Apalagi, bila draft Perpres yang tidak selesai hampir selama 2 tahun ini malah dikembalikan lagi ke Sekretariat Negara," kata Mulyanto.

Perihal pengembalian draft Perpres BRIN dari Kemenkumham ke Sekneg tersebut disampaikan Menristek saat Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Ristek/Kepala BRIN, Senin (18/1).

Menanggapi hal tersebut, Mulyanto mendesak Menristek dan Pimpinan Komisi VII DPR RI untuk melaksanakan rapat gabungan dengan Komisi II dan III DPR RI dan mengundang Menristek, Menpan-RB, Menkumham dan Sekneg untuk

membahas upaya percepatan penerbitan Perpres BRIN ini.

"Dengan demikian berbagai persoalan kelembagaan Iptek dan SDM-nya dapat segera dituntaskan," tegas Anggota Komisi VII DPR RI ini.

Mulyanto menyangkan akibat keterlambatan Perpres tersebut, selama lebih dari satu tahun tidak ada pejabat resmi definitif di Kemenristek/BRIN. Implementasi program dan serapan anggarannya juga rendah karena ketidakjelasan kelembagaan Iptek yang ada.

"Ini manajemen yang amburadul. Seharusnya Presiden Jokowi dapat menyelesaikan masalah ini. Jangan menjadi preseden buruk dalam pembangunan Iptek nasional. Kok bisa-bisanya Presiden disandera anak buahnya. Ini mengherankan," tandas mantan Sesmen Kementerian Ristek di era Presiden SBY ini.

Seperti diketahui BRIN diamanatkan dalam UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Iptek, dimana diatur ketentuan pada Pasal Pasal 48 ayat (1) Untuk menjalankan



**Dr. H. MULYANTO, M.Eng**

Anggota Komisi VII DPR RI

Ini manajemen yang amburadul. Seharusnya Presiden Jokowi dapat menyelesaikan masalah ini. Jangan menjadi preseden buruk dalam pembangunan Iptek nasional. Kok bisa-bisanya Presiden disandera anak buahnya. Ini mengherankan

Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi dibentuk badan riset dan inovasi nasional. (2) Badan riset dan inovasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibentuk oleh Presiden. (3) Ketentuan mengenai badan riset dan inovasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden. Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Aleg PKS: Jadi Magnet Peradaban Islam, Warga Depok Patut Bangga dengan Adanya Kampus UIII

## KUTIPAN

Depok (25/01) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Nur Azizah Tamhid, mendukung penuh pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).

Dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI, Nur Azizah beserta rombongan Komisi VIII yang terdiri dari 17 Anggota Komisi VIII DPR RI, pada Kamis (21/01/2021) meninjau progress pembangunan kampus UIII di Jl. Raya Bogor No. KM 33.5, Cisalak, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat.

Sebagai Anggota DPR RI dari Dapil Kota Depok, Nur Azizah menyatakan dukungan penuh berdirinya UIII di Kota Depok.

Pada kesempatan ini, Nur Azizah menyampaikan rasa syukur sekaligus bangga terhadap proses pembangunan UIII di Kota Depok. Menurutnya, kehadiran UIII di Depok, akan mengangkat nama Kota Depok di kancah Internasional.

“Warga Depok patut

bersyukur sekaligus bangga, Kota Depok dipilih sebagai lokasi berdirinya kampus Islam internasional pertama di Indonesia. Dengannya Kota Depok akan dikenal masyarakat dunia sebagai Kota tempat pusat pembelajaran Islam Internasional Indonesia. Kota Depok akan menjadi magnet baru peradaban Islam di Indonesia”, terang Nur Azizah.

Sementara itu, menurut Bahrul Hayat, yang pernah menjabat sebagai Sekjend Kemenag RI dan Wakil Ketua Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal, dalam pemaparannya terkait laporan progres akademik kampus UIII, Bahrul menjelaskan bahwa UIII didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian Universitas Islam Internasional

Indonesia sebagai Perguruan Tinggi berstandar Internasional yang menjadi model Pendidikan Tinggi Islam yang terkemuka dalam bidang studi agama Islam, Ilmu-ilmu sosial, Humaniora serta Sains dan Teknologi.

“Di lahan seluas sekitar 142 Hektar, UIII berdiri dengan slogan the study of Islam and the study about Islam yang siap bersaing di kancah internasional. Saat ini UIII hadir dengan mengusung konsep Digital Campus yang sudah bekerjasama dengan Telkom. Berbeda dengan kampus lain yang hadir diawali dengan model konvensional lalu beralih ke digital. UIII hadir langsung dengan sistem digital campus”, jelas Bahrul.

Menanggapi hal itu, Nur Azizah menyambut baik sistem pembelajaran kampus UIII. UIII akan memulai pembelajaran pada bulan September 2021 serta target rampungnya pembangunan pada tahun 2024.

Menurut Nur Azizah, Kota Depok akan menjadi tempat datangnya mahasiswa Internasional dari luar negeri dan Indonesia yang belajar



**Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A.**  
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VI

“Warga Depok patut bersyukur sekaligus bangga, Kota Depok dipilih sebagai lokasi berdirinya kampus Islam Internasional pertama di Indonesia. Dengannya Kota Depok akan dikenal masyarakat dunia sebagai Kota tempat pusat pembelajaran Islam Internasional Indonesia. Kota Depok akan menjadi magnet baru peradaban Islam di Indonesia”

tentang Islam dan Kebudayaan Islam Internasional. Dengan adanya UIII, Kota Depok akan menjadi destinasi pusat pembelajaran Islam bagi para pelajar yang datang dari berbagai negara termasuk Indonesia.

“Warga Depok harus mempersiapkan diri

menyambut hadirnya UIII. Diharapkan warga Depok siap mendaftar menjadi salah satu mahasiswa S2/S3 atau menjadi salah satu staf pengajar/tenaga kependidikan di UIII.

Selengkapnya di fraksi.pks.id

# HNW: Lebih Baik **Hadirkan** **Perpres** Awasi Ekstrimisme Korupsi Seperti Korupsi Bansos

## KUTIPAN

Jakarta (22/01) --- Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, menegaskan bahwa semua pihak pastinya menolak ekstrimisme dan terorisme di Indonesia.

Tetapi, imbuh pria yang disapa HNW, langkah Presiden Joko Widodo yang menerbitkan Perpres No. 7 Tahun 2021 yang salah satunya mengatur pemolisian masyarakat dalam mengawasi kegiatan ekstrimisme, tanpa adanya definisi yang dibenarkan oleh UU dan disetujui oleh DPR, layak dikritisi.

"Perpres seperti ini berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), menimbulkan saling curiga dan mengadu domba antar warga masyarakat. Dalam lampiran Perpres itu disebutkan adanya optimalisasi peran pemolisian masyarakat dalam pencegahan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah kepada Terorisme, tetapi tidak dijelaskan secara utuh definisi yang disepakati

soal apa itu 'ekstrimisme berbasis kekerasan' serta apa itu konsep pemolisian masyarakat yang dimaksud. Jangan sampai hal ini menjadi pasal karet yang menjadi justifikasi bagi masyarakat untuk main hakim sendiri atau cepat lapor ke kepolisian tanpa bukti yang dibenarkan terhadap warga masyarakat yang lain hanya karena secara penilaian subyektif dituduh melakukan ekstrimitas," ujarnya dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (21/01/2021).

HNW sapaan akrabnya menegaskan bahwa penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 harusnya menjadi acuan. Juga UU tentang terorisme dan

UU tentang Pertahanan Negara yang sudah mendefinisikan dengan jelas apa itu terorisme dan apa saja ancaman terhadap keamanan negara.

"Salah satu prinsip negara hukum adalah due process of law (proses hukum yang berkeadilan), sehingga segala celah yang dapat memungkinkan adanya tindakan main hakim sendiri harus ditutup secara rapat," terangnya.

Lebih lanjut, HNW menuturkan bahwa apabila yang dimaksud dengan pemolisian masyarakat adalah konsep community policing (yang menciptakan kolaborasi antara polisi/penegak hukum dan komunitas kelompok masyarakat dalam mengidentifikasi kejahatan), maka hal tersebut bisa berbahaya dan berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM) karena belum adanya kesepakatan baik dari rujukan UU yg ada maupun kesepakatan pembahasan di DPR mengenai istilah ekstrimisme.

"Jangan sampai nanti ada kelompok yang gampang sekali disebut ekstrem, padahal



image : tempo.co

## **Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A**

Anggota Komisi VIII DPR RI

"Jangan sampai nanti ada kelompok yang gampang sekali disebut ekstrem, padahal sejatinya mereka hanya ingin menjalankan ajaran agamanya, atau mereka di-framing sebagai melakukan ekstrimisme hanya karena yang bersangkutan bukan dari kelompok politik maupun sosial yang satu kubu dengan pemerintah

sejatinya mereka hanya ingin menjalankan ajaran agamanya, atau mereka di-framing sebagai melakukan ekstrimisme hanya karena yang bersangkutan bukan dari kelompok politik maupun sosial yang satu kubu dengan pemerintah," ujarnya.

Lebih lanjut, Anggota

Komisi VIII DPR RI ini menuturkan bahwa istilah ekstrimisme sendiri kerap menjadi perdebatan di DPR dalam proses pembahasan undang-undang, terutama yang berkaitan dengan terorisme

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Kemendikbud Harus **Beri Kebebasan** bagi UIN untuk Buka Sejumlah Prodi Ilmu Terapan

## KUTIPAN

Jakarta (22/01) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf meminta Kemendikbud untuk memberi keleluasaan dan kebebasan bagi UIN untuk membuka sejumlah prodi ilmu sosial dan sains yang berbasis terapan

Pasalnya, menurut Bukhori, sejauh ini Kemendikbud masih melakukan moratorium terhadap pembukaan sejumlah program studi baru.

“Ilmu terapan saat ini lebih dibutuhkan dalam rangka menjawab tantangan pembangunan nasional. Sehingga, UIN memiliki peran penting dalam menghadirkan jawaban atas tantangan tersebut dengan mendorong model pendidikan dan pembelajaran yang memadukan antara sains dan ilmu agama,” ungkap Bukhori dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI dalam rangka pengawasan peningkatan mutu Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hassanudin Banten

atau UIN Banten di Serang, Banten, Kamis (21/01/2021).

Akan tetapi, demikian Bukhori melanjutkan, kebijakan Kemedikbud yang masih melakukan moratorium terhadap pembukaan sejumlah program studi ilmu terapan justru menjadi penghalang dan melanggar undang-undang.

Dalam kesempatan itu, Bukhori juga memberikan sejumlah masukan maupun catatan penting dalam upaya mendorong peningkatan kualitas pendidikan maupun peran kelembagaan UIN Banten di kawasan.

“Pertama, UIN Banten berkedudukan di wilayah strategis karena industri properti yang menjamur di

wilayah ini. Banyak kawasan properti/perumahan yang terbentang dari Tangerang hingga Ujung Kulon. Dengan demikian, semestinya potensi kawasan tersebut bisa dimanfaatkan dengan optimal oleh kampus, salah satunya, dengan cara membuka prodi manajemen properti sehingga para alumni bisa lekas terserap dan berkiprah dalam membangun kawasan Banten yang maju namun tetap menjunjung tinggi kearifan lokal,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Anggota Baleg ini turut menyorot provinsi Banten sebagai salah satu wilayah dengan jumlah kuota jemaah haji terbesar di Indonesia, yakni 9.493 kuota haji, berdasarkan rilis dari Kementerian Agama pada tahun 2019. Jumlah kuota tersebut menempatkan provinsi Banten di urutan keempat kuota haji terbanyak dari seluruh provinsi di Indonesia.

Lebih lanjut, politisi PKS ini menyoroti Banten sebagai mercusuar pendidikan Islam di kawasan barat Jawa. Karena itu, demikian Bukhori melan-



**KH. BUKHORI, Lc., M.A.**

Anggota Komisi VIII DPR RI

“Ilmu terapan saat ini lebih dibutuhkan dalam rangka menjawab tantangan pembangunan nasional. Sehingga, UIN memiliki peran penting dalam menghadirkan jawaban atas tantangan tersebut dengan mendorong model pendidikan dan pembelajaran yang memadukan antara sains dan ilmu agama

jutkan, sudah sepatutnya provinsi Banten memperoleh bantuan dari manapun, termasuk SBSN, untuk mendirikan sekolah Islam atau universitas Islam dengan kualitas global.

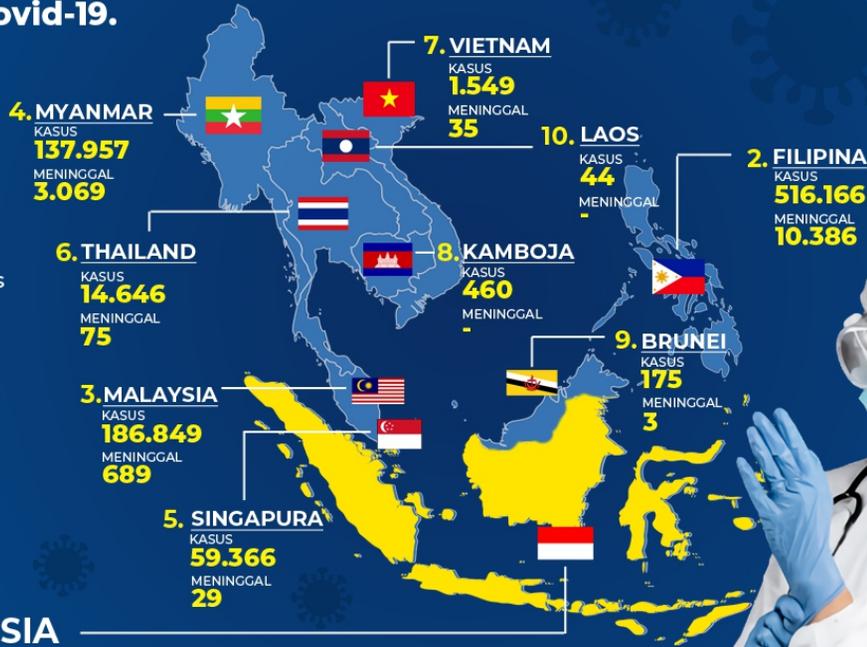
Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# MEMPRIHATINKAN! Indonesia Negara Pertama di ASEAN dengan Kasus Corona Tembus 1 Juta.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

**PKS** Meminta Pemerintah Lebih  
Serius Atasi Covid-19.



Data : Satgas Gugus COVID-19  
Grafis : Aditya Angga

■ Dari data yang dirilis  
Satgas Gugus  
Covid-19 pada  
Selasa (26/1).

**Indonesia menjadi  
negara pertama  
di Asia Tenggara  
yang mencatatkan  
total kasus infeksi  
virus corona  
mencapai 1 juta.**

**1. INDONESIA**

KASUS  
**1.012.350**  
+13.094 Kasus

MENINGGAL  
**28.468**  
2,8% dari terkonfirmasi

SEMBUH  
**820.356**  
81,0% dari terkonfirmasi

“Mari kita berdoa semoga Allah SWT menjaga dan melindungi bangsa Indonesia tercinta dari segala marabahaya.

# Fit and Proper Test Dewas BPJS, Netty: **Harus Figur Berintegritas, Inovatif dan Pro-Rakyat**

## KUTIPAN

Jakarta (25/01) --- Komisi IX DPR tengah melakukan proses fit and proper tes kepada calon Dewan Pengawas BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetyani mengatakan, Komisi IX penting memastikan Dewas BPJS diisi oleh figur yang berintegritas, inovatif dan pro rakyat agar pelaksanaan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan berjalan optimal.

"Komisi IX harus memastikan sosok yang terpilih adalah mereka yang berintegritas, inovatif dan pro rakyat. BPJS dibentuk sebagai amanah Undang-Undang No. 24 Th. 2011, guna memastikan kehadiran negara dalam memberikan jaminan perlindungan kesehatan dan lapangan kerja bagi rakyat. Jangan sampai lembaga ini justru dianggap sebagai penambah beban. Juga pola komunikasi dan hubungan dengan direksi dan DPR perlu

ditingkatkan. Mengingat dewas memberikan saran kepada direksi, melaporkan kepada Presiden, dan dipilih oleh komisi IX," kata Netty dalam keterangannya kepada Media, Senin, (25/01).

Menurut Netty, Komisi IX akan melakukan pendalaman kepada para calon terkait evaluasi pelaksanaan Dewas BPJS periode sebelumnya serta perkembangan situasi terkini, seperti, kenaikan premi saat pandemi, data keanggotaan BPJS, juga tentang potensi korupsi pengelolaan dana jaminan sosial.

"Sungguh ironis jika badan negara yang bertugas memberikan jaminan perlindungan pada rakyat justru didera isu korupsi. Oleh sebab itu, integritas dan rekam jejak yang baik harus menjadi syarat

utama Dewas BPJS," kata Netty. Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu Kejagung RI telah memanggil dua orang Direktur dan meningkatkan status menjadi penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana BPJS Ketenagakerjaan

Terkait kasus ini, Netty meminta Pemerintah agar menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan memberi kesempatan aparat penegak hukum bekerja tanpa intervensi.

"Pastikan proses hukum berjalan dengan adil, transparan dan independen. Saya prihatin dan sedih jika terbukti benar terjadi korupsi di BPJS ketenagakerjaan yang semakin menambah panjang daftar tindak korupsi di lembaga pemerintah. Hal ini harus menjadi tantangan BPJS ketenagakerjaan dan Dewasnya untuk memperbaiki sistem yang ada dan meningkatkan kembali kepercayaan publik," tambah Wakil Ketua Fraksi PKS DPR ini.

Berdasarkan amanat Undang-undang, anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan



**Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si**  
Anggota Komisi IX DPR RI

"Komisi IX akan melakukan pendalaman kepada para calon terkait evaluasi pelaksanaan Dewas BPJS periode sebelumnya serta perkembangan situasi terkini, seperti, kenaikan premi saat pandemi, data keanggotaan BPJS, juga tentang potensi korupsi pengelolaan dana jaminan sosial.

terdiri dari unsur pekerja, pemberi kerja dan tokoh masyarakat. Masing-masing ada 10 calon yang sudah lolos eliminasi dari jumlah sebelumnya.

"Dengan keterwakilan tiga

unsur ini, diharapkan Dewas mampu memberi masukan yang inovatif, aplikatif dan up to date dengan dunia perlindungan sosial, kepada direksi dalam melaksanakan programnya," tutup Netty.

Positif Covid-19 Tembus 1 Juta

# Aleg PKS : Harus Perbaiki Kebijakan Terpadu Berbasis Kesehatan

KUTIPAN

Jakarta (27/01) — Kasus Covid-19 di Indonesia akhirnya menembus angka 1 juta memasuki bulan ke-11 sejak kasus pertama diumumkan.

Berdasarkan data yang dirilis Pemerintah per 26 Januari 2021, dengan penambahan 13.094 kasus harian baru, maka total yang terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia mencapai 1.012.350 kasus dengan masih 16.3526 kasus aktif dan 28.468 yang meninggal dunia. Indonesia juga menjadi negara pertama di ASEAN yang tembus 1 juta kasus covid-19.

Menanggapi jumlah kasus Covid-19 ini, Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menyatakan saatnya pemerintah harus lebih konsisten dengan kebijakan yang diambil dalam penanggulangan Covid-19 ini.

Jika diawal penyebaran Covid-19 Pemerintah terlihat gamang dan tidak konsisten dalam upaya menekan laju penyebaran Covid-19, maka saat ini hal itu tidak boleh lagi

terjadi.

"Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) harus diterapkan secara konsisten. Jangan justru ditengah kebijakan PPKM ini, pemerintah justru membiarkan WNA dari China dalam jumlah cukup banya justru masuk ke Indonesia seperti yang terjadi belum lama ini," papar Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (27/01).

Mufida menyoroti masih longgarnya pembatasan dalam kebijakan PPKM ini. Bahkan mobilitas penduduk masih belum cukup ketat dibatasi dan terkesan tidak konsisten. Perkantoran ditetapkan 75% WFH namun operasional transportasi publik masih sampai malam dan tidak seketat pada saat awal pandemi.

"Pengawasan atas

pelaksanaan PPKM juga masih lemah dan kurang didukung penegakan aturan, sehingga meskipun diberlakukan PPKM, namun kondisi di masyarakat maupun di tempat kerja seperti tidak banyak perubahan. Akibatnya klaster perkantoran tetap bermunculan. Dalam perpanjangan PPKM, kegiatan pusat perbelanjaan justru diperlonggar dengan diperbolehkan beroperasi sampai jam 20.00 dari sebelumnya jam 19.00," papar dia.

Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga ini juga menyoroti meningkat tajamnya klaster keluarga dan klaster pemukiman terutama di perkotaan. Di Jakarta misalnya klaster keluarga meningkat sampai 44%. Di Jawa Barat, peningkatan klaster keluarga menyebabkan meningkatnya daerah yang berstatus zona merah.

Mufida meminta pembatasan sosial maupun pembatasan kegiatan masyarakat harus dilakukan juga dalam skala lokal sehingga pengawasannya juga bisa lebih terfokus.

"Pembatasan mobilitas juga perlu diperketat mengingat

**Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.**

Anggota Komisi IX DPR RI

“Sebaiknya yang dilakukan adalah perbaikan dan pembenahan secara internal dan tidak menyalahkan terbuka yang bisa menjatuhkan pekerja di Kementerian Kesehatan. Demikian pula dengan metode penentuan testing yang dianggap salah pada metode tes tersebut sudah sesuai denga kaidah Test-Tracing-Treatment plus menjaring orang yang OTG agar tidak menularkan yang lain”

meningkatnya klaster keluarga di bulan ini diantaranya dampak dari libur natal dan tahun baru lalu dimana banyak keluarga berpergian,” ungkapnya.

Wakil Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini juga mengingat-

kan bukan saatnya lagi saling menyalahkan antar instansi pemerintah terkait lonjakan kasus dan upaya pengendalian penyebaran covid-19 ini.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Komisi IX DPR Pantau Persiapan Pelaksanaan Vaksinasi di Pandeglang

## KUTIPAN

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar menyampaikan, salah satu upaya yang dilakukan dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia adalah dengan melakukan vaksinasi.

Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, akan melaksanakan vaksinasi pada tahap pertama termin kedua, yakni pada Februari 2021. Ansory menambahkan, guna mengetahui persiapan pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Pandeglang tersebut, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ingin menggali informasi mengenai sudah sejauh mana persiapan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Pandeglang beserta stakeholder lainnya.

"Komisi IX DPR RI melakukan pengawasan terhadap persiapan pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Pandeglang, dengan tujuan untuk menghimpun data-data dan informasi yang komprehensif dan akurat dari para pemangku kepentingan tentang akses vaksin Covid-19

dan juga pelaksanaan vaksinasi yang akan dilakukan di Kabupaten Pandeglang," ucap Ansory di sela-sela kunjungan ke Pandeglang, Banten, Jumat (22/1/2021).

Selain itu, sambung politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) tersebut, Komisi IX DPR RI juga ingin melakukan analisa tentang kebijakan yang telah dan akan ditempuh pemerintah Kabupaten Pandeglang, baik dalam masa persiapan maupun dalam tahap pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

"Kami ingin memperoleh masukan, apakah terdapat permasalahan dalam masa persiapan dan pelaksanaan koordinasi Covid-19 ini, serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan ketentuan yang diambil pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19

di Kabupaten Pandeglang," tutur Ansory.

Ia menyatakan, Komisi IX DPR RI juga akan menyusun rekomendasi yang dapat ditujukan kepada semua pihak agar pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Pandeglang dapat dilakukan dengan baik dan lancar.

"Memang masih ditemukan beberapa kendala dalam persiapannya, seperti masalah sarana dan prasarana pendukung maupun tenaga kesehatan. Kami telah meminta kepada Menteri Kesehatan untuk melakukan relaksasi atau kemudahan-kemudahan terkait masalah tenaga kesehatan ini. Dengan adanya relaksasi dan kemudahan-kemudahan tersebut, maka segala kekurangan yang ada bisa kita relaksasikan secara signifikan," ujarnya. Ansory menilai, sejauh ini persiapan pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Pandeglang sudah cukup baik.

Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang memaparkan hal-hal apa saja yang sudah dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan vaksinasi di wilayah Kabupaten Pandeglang, di antaranya yaitu



## H. ANSORY SIREGAR, Lc,

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI

"Kami ingin memperoleh masukan, apakah terdapat permasalahan dalam masa persiapan dan pelaksanaan koordinasi Covid-19 ini, serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan ketentuan yang diambil pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Pandeglang

melakukan pendataan fasilitas pelayanan kesehatan, registrasi dan verifikasi sasaran, melakukan perhitungan kebutuhan kulkas tempat penyimpanan vaksin, serta menginventarisasi sarana dengan menggunakan sistem online.

Seperti diketahui, terkait vaksinasi ini Pemerintah telah mengeluarkan beberapa

peraturan, diantaranya yakni Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 Tentang Pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Corona virus disease 2019 (Covid-19),

Selengkapnya kunjungi [fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)



# Wakil Ketua Komisi X FPKS minta Kemenpar- Ekraf **Tambah Alokasi** Desa Wisata

## KUTIPAN

Jakarta (27/01) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih meminta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahudin Uno menambah alokasi anggaran untuk desa wisata di tanah air.

"Hanya sedikit desa wisata yang jadi program dan disasar anggaran Kementerian, padahal potensinya sangat besar," kata Fikri dalam rapat kerja di Komisi X DPR yang digelar secara virtual, Selasa (26/01/2021).

Menurut Fikri, desa wisata yang tercatat saat ini mencapai 7.700 lebih desa yang tersebar di 514 kabupaten/kota di Indonesia. Namun, alokasi anggaran Kemenparekraf hanya untuk 244 desa wisata saja. "Ini kan berarti hanya 3,1 persen desa wisata yang diperhatikan," ungkapnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menyebutkan soal data organisasi pariwisata PBB (UNWTO), bahwa kunjungan wisata ke wilayah pedesaan

meningkat meskipun pandemi tengah melanda dunia. "Minimal naik 6 persen," kutip Fikri.

Sehingga hal tersebut dinilai merupakan peluang agar pariwisata di RI bisa melakukan recovery setelah dihantam pandemi.

"Harapannya besar, namun alokasinya sangat sedikit, padahal kemenparekraf punya benchmarking ke Austria segala," kata Fikri mengacu pada presentasi Menparekraf.

Selain itu, karena 4 desa wisata di Indonesia berhasil masuk dalam Top 100 Destinasi Berkelanjutan di Dunia versi Global Green Destinations Days (GGDD) pada 2019 silam.

"Empat desa masuk

destinasi unggulan dunia, 2 di Bali dan 2 di Yogyakarta," kata Fikri.

Empat desa wisata yang masuk dalam program itu adalah Desa Pemuteran (Bali), Desa Penglipuran (Bali), Desa Wisata Nglanggeran (Yogyakarta), dan Desa Pentingsari (Yogyakarta). Desa-desanya ini menjadi cerminan dari kesuksesan mengelola pariwisata yang berkonsep pada semangat lingkungan dan budaya lokal.

Fikri menambahkan, pengembangan desa wisata berbasis lingkungan dan budaya lokal tersebut harus berkonsentrasi pada konservasi.

"Desa-desanya tersebut mendunia karena berhasil konservasi lingkungan & budaya, bukan karena banyak inovasi, nah konservasi lingkungan dan budaya ini harus dikembangkan agar jadi rujukan desa-desanya wisata lain dengan potensi serupa," tandasnya.



**Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM**

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

"Desa wisata yang tercatat saat ini mencapai 7.700 lebih desa yang tersebar di 514 kabupaten/kota di Indonesia. Namun, alokasi anggaran Kemenparekraf hanya untuk 244 desa wisata saja. Ini kan berarti hanya 3,1 persen desa wisata yang diperhatikan

# Aleg PKS: Efektivitas Kebijakan Ekonomi & Keberhasilan Vaksinasi **Kunci** Pulihnya Ekonomi Nasional

**KUTIPAN**

Jakarta (27/01) — Pemerintah dalam APBN 2021 beserta sejumlah lembaga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berkisar di level 4 hingga 6 persen.

Meski demikian potensi pertumbuhan ini masih berisiko tertarik kebawah akibat risiko dari pandemi yang terus mengalami kenaikan bahkan melebihi 1 juta kasus.

Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly menilai ada dua kunci kebijakan yang bisa berpengaruh pada pencapaian pertumbuhan ekonomi tahun ini yaitu program vaksinasi dan efektivitas kebijakan ekonomi pemerintah.

Menurutnya, pemulihan ekonomi akan bergantung pada keberhasilan kedua aspek tersebut. "Selain keberhasilan vaksinasi yang akan menysasar pada 70 persen penduduk, pemerintah harus mengubah cara kerja dalam penanganan

pandemi agar ekonomi bisa segera pulih," ujar Junaidi dalam rilis yang diterima di Jakarta, Rabu, (27/01)

Dalam menjaga daya tahan ekonomi di tengah pandemi, lanjut Junaidi, Pemerintah diminta untuk meningkatkan efektivitas kebijakannya dengan mendorong faktor permintaan yang sangat krusial khususnya demand untuk konsumsi baik rumah tangga, pemerintah maupun untuk kebutuhan investasi berbagai sektor ekonomi. Ia mengatakan peran belanja APBN, belanja PEN, belanja BUMN, serta penyaluran kredit dan pembiayaan dari perbankan sangat penting untuk dipacu.

"Dalam situasi ini pemerintah menunjukkan sense of crisis yang rendah, bahkan anggaran kesehatan tidak ada separuhnya dari anggaran infrastruktur," kata Junaidi.

Terkait keberlanjutan Program Ekonomi Nasional (PEN) 2021, Politisi dari Dapil Lampung II ini menegaskan bahwa PEN 2021 hendaknya direalisasikan secara cepat dan tepat sasaran. Lambatnya eksekusi dan realisasi menjadi catatan penting pada PEN 2020 yang harus segera diatasi.

**Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.**

Anggota Komisi XI DPR RI

Dalam menjaga daya tahan ekonomi di tengah pandemi, lanjut Junaidi, Pemerintah diminta untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonominya dengan mendorong faktor permintaan yang sangat krusial khususnya demand untuk konsumsi baik rumah tangga, pemerintah maupun untuk kebutuhan investasi berbagai sektor ekonomi.

# Terkait Lembaga Pengelola Investasi, Aleg PKS: **Harus Dikaji Mendalam** agar Siap dengan Resiko

## KUTIPAN

Jakarta (26/01) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyampaikan sejumlah catatan dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan

yang membahas tentang Lembaga Pengelola Investasi (Sovereign Wealth Fund) yang telah resmi tercantum dalam Undang-undang Cipta Kerja. Rapat kerja ini diselenggarakan secara virtual di Jakarta, pada Senin (25/01/2021).

Dalam pernyataan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan, Anis mengingatkan bahwa sejauh ini, terdapat resiko yang dimiliki oleh negara penerima investasi yang tercermin dari munculnya kekhawatiran-kekhawatiran mengenai dampak politik yang kemungkinan muncul atau sengaja dibawa oleh negara investor SWFs.

"Kekhawatiran ini sendiri timbul dikarenakan dua hal utama, yaitu: pada kenyataannya dikontrol oleh entitas nasional dan bukan

investor swasta dan jumlah entitas yang terlibat relatif kecil," ungkapnya.

Dua hal tersebut, lanjut Anis, kemudian menyebabkan timbulnya kekhawatiran penggunaan SWFs sebagai salah satu bentuk soft power, dimana SWFs merupakan strategi pengambilalihan dalam mengejar tujuan nasional di negara penerima investasi. Kekhawatiran ini semakin diperburuk dengan kurangnya transparansi dalam pengoperasian pengelolaan dana tersebut oleh negara investor.

"Kementerian Keuangan dan kementerian BUMN harus benar-benar siap menghadapi resiko bawaan berupa soft power dari investor SWF, yang akan dihadapi Indonesia sebagai negara penerima investasi melalui LPI," ujar Anis.

Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS ini juga mengingatkan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN agar waspada mengenai beberapa isu negatif tentang SWF yang dikemukakan berbagai peneliti.

"Diantara isu negative tersebut antara lain: semakin besar dana yang mereka kelola akan semakin besar dampaknya pada pasar keuangan dunia, adanya kepemilikan oleh pemerintah asing di perusahaan-perusahaan nasional membuat banyak orang mengkhawatirkan masalah keamanan nasional karena motif investasi mereka seringkali dikawatirkan memiliki tujuan politik yang diperburuk dengan kurangnya laporan hasil kinerja mereka sangat buruk," papar Anggota DPR asal Jakarta Timur ini.

Selanjutnya, politisi senior PKS ini menyampaikan data bahwa berdasarkan laporan dan pernyataan dari OECD, terdapat resiko proteksionisme mengancam ekonomi dunia dan SWF.

"Sehingga dalam prakteknya baik dari sisi



**Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si**  
Anggota Komisi XI DPR RI

“Kemenkeu juga harus memiliki kajian, dalam kurun waktu berapa lama SWF dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Disertai mitigasi resiko yang muncul dengan adanya SWF, sehingga Kemenkeu bisa merumuskan Langkah-langkah strategis penanggulangannya.”

investor maupun investee, terdapat dua prinsip yang harus dipenuhi, yaitu prinsip non discrimination dan prinsip transparency,” pungkasnya.

Jika hal tersebut dapat tercapai, imbuhnya, maka ekonomi internasional akan semakin terintegrasi dengan

semakin berkembang dan intensnya arus modal internasional yang aman dan menguntungkan bagi semua pihak, baik pemilik maupun penerima modal.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



*Mari Tetap*  
**Patuhi** Protokol  
*Kesehatan*

# 'BKSAP Day' Jembatani Potensi Sulsel dengan Dunia Internasional

## KUTIPAN

Sulsel (23/01) — Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI **Mardani Ali Sera** menyatakan perhelatan 'BKSAP Day' bertujuan meningkatkan sinergi kolaborasi dalam menyerap aspirasi dari pemerintah daerah hingga akademisi tak terkecuali di Provinsi Sulawesi Selatan.

la menambahkan, BKSAP juga melakukan pemetaan potensi daerah seperti UMKM dan dikaitkan dengan peluang diplomasi parlemen.

Hal ini disampaikan **Mardani** usai memimpin Tim Kunjungan Kerja BKSAP ke Sulawesi Selatan dalam rangka penyelenggaraan BKSAP Day Tema: Diplomasi DPR RI dan Potensi Sulsel: Sinergi dan Kolaborasi, di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Jumat (22/1/2021). Turut hadir, Anggota BKSAP DPR RI **Jazuli Juwaini** dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel **Abdul Hayat Gani**.

"Dalam diplomasi parlemen kami BKSAP DPR RI mengenal lebih dalam potensi kekuatan fakta data dari provinsi-provinsi yang ada di

Indonesia. Kemudian, untuk selanjutnya menjadi jembatan komunikasi diplomasi sinergi kolaborasi Indonesia dengan pihak luar yaitu dunia internasional," ujar **Mardani**.

**Politikus** Fraksi PKS tersebut mengapresiasi berbagai masukan sebagai inside dan inspiration dari pihak Universitas Hasanuddin dan Universitas Negeri Makassar. Salah satunya, usulan mengenai potensi UMKM di Provinsi Sulsel yang bisa diperkenalkan dan dipasarkan di dunia internasional.

UMKM di Sulsel bisa menjadi potensi yang memberikan benefit kesejahteraan bagi masyarakat. "Tentu, ini berkaitan pemasaran bagaimana produk dan hasil dari potensi Sulsel untuk diperkenalkan di dunia

internasional. BKSAP DPR RI siap membantu dalam diplomasi parlemen internasional," ucap **Mardani** berkomitmen.

**Mardani** juga mengapresiasi usulan dan aspirasi dari Dekan Universitas Hasanuddin **Prof. Dr. Armin** mengenai 'one village one product'. Di mana, masing-masing produk unggulan daerah bisa di-branding dan dijual ke dunia internasional untuk menunjukkan betapa kayanya perdagangan internasional Indonesia.

la mencontohkan, BKSAP DPR RI mengadakan pertemuan dengan **Wamenlu Mahendra Siregar**. Pertemuan tersebut mengundang organisasi pariwisata internasional sebagai upaya membantu peningkatan kualitas pariwisata Bali.

"Bukan hanya branding tetapi juga produk dan kualitas dari pariwisatanya yang ditawarkan. Bukan hanya pariwisata massal tapi pariwisata butik yang justru akan mendatangkan kesejahteraan yang lebih besar lagi bagi masyarakat Bali. Benchmark Bali tersebut yang akan kita bawa itu untuk Sulsel dan daerah-daerah lain yang akan kami elaborasi dengan Kemenlu," pungkas **Mardani**. (pun/es)



**Dr. H. MARDANI, M.Eng**

Wakil Ketua BKSAP DPR RI

"Dalam diplomasi parlemen kami BKSAP DPR RI mengenal lebih dalam potensi kekuatan fakta data dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Kemudian, untuk selanjutnya menjadi jembatan komunikasi diplomasi sinergi kolaborasi Indonesia dengan pihak luar yaitu dunia internasional





# Ketua FPKS: Perlindungan Data Pribadi **Mutlak Memerlukan Lembaga Pengawas Independen**

## KUTIPAN

Jakarta (26/01) --- Anggota Panja RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) Jazuli Juwaini mengatakan bahwa untuk menjamin perlindungan data pribadi diperlukan desain lembaga pengawas yang independen.

Jazuli yang juga Ketua Fraksi PKS DPR ini menegaskan bahwa Fraksinya akan mendorong terwujudnya lembaga pengawas independen PDP tersebut.

"Data pribadi saat ini sudah menjadi komoditas strategis baik oleh publik, swasta, bisnis, maupun pemerintah. Namun sayangnya masih banyak penyalahgunaan yang terjadi. Perspektif RUU PDP melindungi data warga negara dari penyalahgunaan oleh siapa pun baik swasta maupun instansi pemerintah. Disitulah urgensi lembaga pengawas independen," tandas Jazuli.

Independen disini, lanjut Jazuli, maknanya memiliki kemandirian secara

kelembagaan, birokrasi, keuangan, manajemen, komisioner, dan sumber daya manusia lainnya.

Menurut Anggota Komisi I DPR ini, lembaga pengawas independen menjamin tidak ada konflik kepentingan, non intervensi, jaminan transparansi dan keadilan jika ada penyalahgunaan dan kegagalan perlindungan data pribadi.

"Selain itu, pengawas independen juga menjamin prinsip good governance, yaitu pemisahan antara regulator, pengawas, dan pengelola/pengguna data pribadi. Serta memberi jaminan penyelesaian perkara yg efektif," ungkapnya.

Nantinya, menurut Anggota

Panja PDP ini, pengawas independen memiliki tugas melakukan sosialisasi, mengawasi, menangani sengketa administrasi, melakukan mediasi dan memberi rekomendasi, dan berkoordinasi serta melimpahkan permasalahan terkait pidana ke kepolisian.

Meski demikian, Ketua Fraksi PKS ini mengatakan masih perlu elaborasi perihal apa lembaganya, apakah membentuk lembaga baru atau memberdayakan dengan menambah kewenangan lembaga yang ada seperti memberdayakan Komisi Informasi yang saat ini telah beroperasi.

"Di sejumlah negara Eropa seperti Inggris, Swiss, dan Jerman berlaku otoritas tunggal yang mengatur perlindungan data pribadi dan kebebasan informasi. Mengapa kelembagaannya disatukan karena interpertasi antara data pribadi yang harus dilindungi dengan kebebasan informasi memiliki irisan yang bertalian sehingga kelembagaan pengawas lebih baik disatukan,"



## Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

“Lembaga pengawas independen menjamin tidak ada konflik kepentingan, non intervensi, jaminan transparansi dan keadilan jika ada penyalahgunaan dan kegagalan perlindungan data pribadi.”

terang Jazuli.

Meski demikian, di sejumlah negara Eropa lain ada model dual otoritas antara perlindungan data pribadi dan kebebasan informasi.

Model-model tersebut, menurut Jazuli, menjadi bahan pengayaan. Namun yang

terpenting adalah sifat independen dari lembaga pengawas yang nantinya bertugas melindungi data pribadi dan menangani sengketa atau pelanggaran data pribadi warga negara.



# Perlindungan Data Pribadi **Mutlak** diperlukan Lembaga Pengawas Independen

Jakarta (26/01) — Anggota Panja RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) Jazuli Juwaini mengatakan bahwa untuk menjamin perlindungan data pribadi diperlukan desain lembaga pengawas yang independen.

Jazuli yang juga Ketua Fraksi PKS DPR RI ini menegaskan bahwa Fraksinya akan mendorong terwujudnya lembaga pengawas independen PDP tersebut.

## **99** KUTIPAN

Data pribadi saat ini sudah menjadi komoditas strategis baik oleh publik, swasta, bisnis, maupun pemerintah. Namun sayangnya masih banyak penyalahgunaan yang terjadi. Perspektif RUU PDP melindungi data warga negara dari penyalahgunaan oleh siapa pun baik swasta maupun instansi pemerintah. Disitulah urgensi lembaga pengawas independen

**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**  
Ketua Fraksi PKS DPR RI



Hadiri Acara Perpisahan Tim Penggerak  
PKK Sumbar,

## Nevi **Sampaikan** Terima kasih pada Seluruh Pihak

### KUTIPAN

Padang (26/01) --- Anggota DPR RI asal Sumatera Barat dari Fraksi PKS, Nevi Zuarina menghadiri pertemuan rutin Pengurus Tim Penggerak PKK Provinsi Sumbar, di Auditorium Gubernur, Sumatera Barat.

Dalam Pertemuan yang dihadiri seluruh pengurus dan anggota TP PKK, Dekranasda dan Bundo Kandung Sumbar, Ibu-ibu Ketua TP PKK se-Sumbar, Ibu-ibu Ketua GOW se-Sumbar dan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, dijadikan ajang berpamitan, karena akan segera melepas jabatannya sebagai ketua TP PKK.

Dalam sambutannya, Legislator asal Sumbar ini menyampaikan, acara ini merupakan dilakukan setiap bulan, namun kali ini adalah acara terakhir bagi kepemimpinan Nevi Zuarina sebagai Ketua TP PKK Sumbar.

"Karena sebentar lagi kami akan mengakhiri jabatan sebagai ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda, artinya kita akan berpisah setelah sekian lama kita bersama," kata Nevi

Zuarina.

Nevi menyampaikan rasa terima kasih kepada ibu-ibu TP PKK yang telah bekerja sama dalam membangun Sumbar dan berprestasi menggerakkan masyarakat untuk pelaksanaan 10 program pokok PKK di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

"InsyaAllah kita dapat bertemu kembali pada acara yang berbeda dan silaturahmi tetap berjalan, tentunya dengan status yang berbeda pula. Saya sebagai anggota DPR RI akan banyak bertemu berbagai kalangan terutama UMKM, Petani dan komunitas Religi," ucap Nevi.

Bagi Nevi, TP PKK adalah kebanggaan, banyak prestasi yang telah di raih oleh PKK Sumbar maupun di daerah.

Nevi melanjutkan,

Kekompakan PKK, Dekranasda dan seluruh pihak terkait harus terus untuk membangun sinergi yang baik. Apalagi saat ini Dekranasda dan PKK kabupaten kota memiliki inovasi dan kreativitas masing-masing.

"Kami mengharapkan kader PKK tetap bersemangat dan selalu berinovasi demi memajukan daerah masing-masing. Mari kita sukseskan 10 program pokok PKK demi menuju keluarga sejahtera dan bahagia. Pembangunan infrastruktur memang penting, tetapi lebih penting membangun manusianya," Ucap Nevi dengan yakin.

"Tidak terasa bahwa waktu berjalan dengan sangat cepat, sudah sepuluh tahun, saya bersama suami, Bapak Irwan Prayitno, seayun selangkah dalam pengabdian di Provinsi Sumatera Barat. Ada banyak pengalaman berharga yang saya terima selama ini. Yang jelas, saya berterima kasih atas segala macam dukungan kerjasama, buah pikiran dan waktu yang diberikan selama ini," ujar Nevi Zuarina.

Selengkapnya kunjungi [fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)



**Hj. NEVI ZUARINA**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat II

"Ada banyak pengalaman berharga yang saya terima selama ini. Yang jelas, saya berterima kasih atas segala macam dukungan kerjasama, buah pikiran dan waktu yang diberikan selama ini,"



# Legislator Asal Lampung Junaidi Auly Minta KKN Mahasiswa Unila **Ditunda**

## KUTIPAN

Lampung (21/01) — Anggota DPR RI asal Lampung dari Fraksi PKS, Junaidi Auly meminta kepada civitas akademik Universitas Lampung (Unila) untuk menunda kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) secara tatap muka yang akan dilakukan oleh mahasiswa

Menurut Junaidi, program ini berpotensi penyebaran virus korona semakin meluas ke berbagai kabupaten di Provinsi Lampung.

"Ada keluhan yang disampaikan ke saya bahwa kampus Unila akan tetap mengadakan KKN bagi mahasiswanya, ini harus ditunda sampai pandemi selesai, jangan sampai ini menjadi klaster baru di Lampung," ujar Junaidi dalam keterangan tertulis. Kamis, (21/01)

Legislator PKS dari Dapil Lampung II ini melanjutkan, Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Lampung harus tegas mendesak agar kampus menunda program tersebut karena kondisi saat ini penderita Covid-19 di Lampung makin tinggi.

"Dalam kegiatan KKN yang didalamnya ada sosialisasi dan program kerja yang dilakukan tentu akan menimbulkan kerumunan yang membahayakan mahasiswa dan masyarakat setempat di lokasi KKN," pungkasnya.

Selain itu, tambahnya, Peserta KKN yang rencananya akan tersebar ke delapan Kabupaten di Provinsi Lampung mayoritas mereka berangkat dari Bandar Lampung yang termasuk zona merah Covid-19.

Perlu diketahui, data dari Kemenkes saat ini total kasus dan kasus aktif di Lampung terus meningkat. Total kasus mencapai 8.143 kasus meningkat 29,75% dari Desember 2020, kasus aktif mencapai 2.196 kasus mening-

kat 30,33% dari Desember 2020, kabupaten/kota dengan total kasus dan kasus aktif tertinggi adalah Bandar Lampung, Lampung Tengah, dan Lampung Utara. Sedangkan rasio kematian karena Covid-19 mencapai 433 jiwa atau sebesar 5,2% yang lebih tinggi dari rasio nasional 2,9%.

"Data diatas sudah menjadi bukti bahwa Lampung siaga satu Covid-19 artinya sangat mengkhawatirkan, Pihak kampus Unila harus melihat data ini agar menunda kegiatan KKN tatap muka," tegas Junaidi.

Politisi Fraksi PKS ini kembali menegaskan Pimpinan kampus Unila agar mendengarkan dan menindaklanjuti aspirasi dari mahasiswanya, selain itu juga harus merespon rekomendasi dan teguran dari Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Lampung agar menunda kegiatan KKN tatap muka.

"Pencegahan penyebaran virus korona harus dilakukan semua pihak, potensi penyebaran akan meluas dan pandemi tidak akan selesai jika pihak kampus tetap ngotot melaksanakan KKN tatap muka," tutup Junaidi.



**Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.**  
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Lampung I

"Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Lampung harus tegas mendesak agar kampus menunda program tersebut karena kondisi saat ini penderita Covid-19 di Lampung makin tinggi. Dalam kegiatan KKN yang didalamnya ada sosialisasi dan program kerja yang dilakukan tentu akan menimbulkan kerumunan yang membahayakan mahasiswa dan masyarakat setempat di lokasi KKN

# Takziah ke Tetangga, Nur Azizah **Ingatkan** untuk Terus Amalkan Dzikir Ayat Al-Quran

## KUTIPAN

Depok (21/01) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Nur Azizah Tamhid, melakukan Takziah tetangga dekatnya yang wafat selepas terjatuh

pada Rabu (20/1) di RT 002 RW 011 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis Kota Depok.

Nur Azizah mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Mardiah.

"Saya turut berdukacita dengan wafatnya Ibu Mardiah. Kita semua mendoakan agar Almarhumah wafat dalam keadaan Husnul Khatimah, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan kesabaran," ungkap Nur Azizah.

Pada kesempatan ini Nur Azizah mengingatkan agar semua yang hadir dalam takziah terus mendoakan almarhumah

serta tidak lupa untuk terus mengamalkan dzikir harian.

"Terdapat beberapa fadhilah membaca surat dan ayat Al-Quran yang baiknya rutin diamalkan dalam dzikir harian. Sebagaimana sering saya sampaikan, melalui dzikir yang rutin kita amalkan ini, Insya Allah akan Allah mudahkan setiap kesulitan dan masalah yang kita hadapi", jelas Nur Azizah.

Nur Azizah menjelaskan fadhilah atau keutamaan bagi orang-orang yang rutin mengamalkan dzikir ayat Al-Qur'an.

"Akan mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah, mendapatkan syafa'at Al-Qur'an, tampilan fisik dan rohani yang menyenangkan orang-orang disekitarnya, serta hidupnya akan dimuliakan oleh malaikat," terang Anggota Komisi VIII DPR RI ini.

Tak hanya itu, Nur Azizah turut mengingatkan, ditengah bencana yang banyak melanda Indonesia saat ini, mulai dari Pandemi Covid-19, Banjir di Kalimantan, Longsor di Sumedang, dan Jatuhnya

pesawat Sriwijaya Air, serta banyaknya tenaga medis dan orang-orang soleh yang juga wafat, harus membuat kita sadar bahwa kematian itu begitu dekat.

"Semua musibah ini merupakan teguran, yang sudah seharusnya kita sebagai umat Islam tidak lalai, kematian itu begitu dekat, kita harus terus meningkatkan kapasitas ibadah salah satunya dengan terus melafadzkan dzikir, karena maut bisa kapan saja menjemput kita. Tidak mengenal waktu dan tempat. Kita sebagai umat muslim harus senantiasa ada dalam kondisi siap untuk wafat kapan pun", pungkas Nur Azizah.

Almarhumah Mardiah yang wafat di usia 54 tahun merupakan tetangga dekat Nur Azizah sekaligus salah satu Jemaah Majelis Taklim Al-Hidayah binaan Nur Azizah, sejak tahun 2001.



**Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A.**  
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VI

"Semua musibah ini merupakan teguran, yang sudah seharusnya kita sebagai umat Islam tidak lalai, kematian itu begitu dekat, kita harus terus meningkatkan kapasitas ibadah salah satunya dengan terus melafadzkan dzikir





**Turut  
Berduka  
Cita**



**PKS**

Keluarga Besar Fraksi PKS DPR RI  
Turut Berduka Atas Wafatnya

## **Ust. Abdullah Qomaruddin, Lc**

Dosen dan Pendakwah

Semoga semua kebaikan & amal ibadah  
Almarhum diterima di sisi Allah SWT.  
Semoga keluarga yang ditinggalkan  
diberikan kekuatan dan kesabaran.



**Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T**

Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

Miliki Kampus Islam Internasional

# Nur Azizah: Kota Depok Harus Dapat Memperagakan Kehidupan Islam yang Atraktif

## KUTIPAN

Depok – Kamis (21/1), dalam rangka pengawasan pembangunan kampus UIII di Kota Depok, Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A. berharap

kehadiran Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di Kota Depok tidak hanya akan menjadi Pusat Pendidikan Peradaban Islam di Indonesia, tapi UIII dapat memberikan dampak signifikan bagi Pemerintah dan Warga Kota Depok. “Sebagaimana Kota Depok yang memiliki visi RPJMD 2016-2021 Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius, kehadiran UIII diharapkan dapat menjadikan warga Depok dapat mempragakan kehidupan Islam yang lebih atraktif”, jelas Nur Azizah.

Kehadirannya UIII di Kota Depok sebagai Perguruan Tinggi Negeri Pertama dibawah naungan Kemenag yang

berstatus Badan Hukum (PTN-BH), Nur Azizah soroti UIII sejajar dengan PTN-BH lainnya seperti UGM, ITB, UI dan IPB. Menurutnya, UIII bahkan memiliki nilai lebih karena menjadikan Pendidikan keislaman sebagai landasan utama dari setiap bidang studi yang ditawarkan.

Sementara itu, menurut Rektor UIII, Prof. Komarudin Hidayat, UIII berdiri sebagai bentuk kelanjutan dari gagasan para pendahulunya, yaitu mereka para pendiri ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan yang lainnya untuk terus melestarikan khazanah

keilmuan Islam di Indonesia.

Selain itu, Komarudin berharap, UIII dapat menjadi Pusat Kajian Islam Internasional di Indonesia yang kaya akan pengalaman. Menurutnya, Banyak Mahasiswa Indonesia menerima beasiswa di beberapa negara berkembang yang bahkan statusnya lebih miskin dari Indonesia seperti di Sudan dan Maroko. Mereka berkuliah dengan biaya full ditanggung oleh pemerintah setempat. Harapannya, UIII kelak juga dapat menyediakan beasiswa bagi mahasiswa Internasional.

“Sebagaimana pesan Pak Jusuf Kalla saat peresmian awal pembangunan UIII di tahun 2018, bahwa UIII harus mampu mengangkat harga diri Indonesia, bahwa kita bisa memberikan beasiswa tidak hanya bagi mahasiswa Indonesia tapi juga bagi mahasiswa asing untuk mempelajari peradaban Islam di Indonesia”, jelas Komarudin. Sementara, Bahrul Hayat juga menyampaikan, bahwa Jusuf



## Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VI

“Kehadiran UIII merupakan bentuk realisasi dari cita-cita dan keinginan PKS menjadikan Islam Rahmatan lil alamin, jurusan-jurusan yang dihadirkan di UIII harapannya dapat mendorong peradaban Islam Indonesia menjadi semakin baik dinikmati umat manusia”

Kalla menegaskan agar proses pembangunan UIII sepenuhnya dibiayai oleh APBN.

UIII didesain untuk menyelenggarakan Pendidikan Program S2 dan S3. “Di tahun awal akan dibuka empat Fakultas diantaranya; Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Studi Islam, Fakultas Pendidikan,

dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sementara tiga fakultas lainnya yakni; Fakultas Humaniora, Fakultas Sains dan Teknologi, Serta Fakultas Sains Murni dan Terapan, akan menyusul tiga tahun kemudian”, terang Komarudin.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Bersama Stuktur DPD PKS Kab. Tasikmalaya, Toriq **Beri Bantuan Bedah** Rumah Warga Tak Mampu

## KUTIPAN

Rumah yang sudah tidak layak huni ini diperparah dengan kondisi musim penghujan. Jika tidak segera diperbaiki dikhawatirkan Atap rumah akan roboh. Atas kesiagaan Ketua RT dan kepedulian warga sekitar rumah Bu Nok, mereka bergotong royong memperbaiki rumahnya.

Tasikmalaya (24/01) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat, bekerjasama dengan DPD PKS Kabupaten Tasikmalaya memberikan bantuan bedah rumah tidak layak huni (RTLH) seorang warga Desa Janggala Kecamatan Sukaraja kabupaten tasikmalaya.

Program bantuan bedah rumah oleh politisi PKS daerah pemilihan Jabar 11 yang meliputi Kota dan Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Garut ini menasar warga-warga yang secara ekonomi kurang mampu.

“Saat ini yang diberikan

bantuan bedah rumah oleh Bapak Toriq adalah rumah yang dihuni oleh Bu Nok. Rumah yang dihuni bersama keluarganya itu sudah tidak layak dihuni”, ungkap Ruli, Ketua DPD PKS Kab. Tasikmalaya sekaligus mewakili Toriq Hidayat, saat menyerahkan bantuan (23/01/2021).

Ia menambahkan, rumah dan tanah yang ditinggali Bu Nok saat ini adalah milik sebuah yayasan. Atas kebaikan hati Pemilik, Bu Nok dan keluarga diizinkan untuk menempati rumah dan tanah tersebut. Sejak suaminya sakit,

Bu Nok mengambil alih tugas menjadi tulang punggung keluarganya.

Rumah yang sudah tidak layak huni ini diperparah dengan kondisi musim penghujan. Jika tidak segera diperbaiki dikhawatirkan Atap rumah akan roboh. Atas kesiagaan Ketua RT dan kepedulian warga sekitar rumah Bu Nok, mereka bergotong royong memperbaiki rumahnya.

Bu Nok mengatakan dirinya sangat berterima kasih kepada Aleg PKS, DPD PKS dan Ketua RT serta warga yang telah membantu membedah rumahnya.

“Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Toriq, PKS, Pak RT dan warga Desa Janggala, semoga Allah SWT membalas budi baik bapak-bapak semua,” ungkapnya.



**KH. TORIQ HIDAYAT, Lc**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat XI

“Rumah dan tanah yang ditinggali Bu Nok saat ini adalah milik sebuah yayasan. Atas kebaikan hati Pemilik, Bu Nok dan keluarga diizinkan untuk menempati rumah dan tanah tersebut. Sejak suaminya sakit, Bu Nok mengambil alih tugas menjadi tulang punggung keluarganya.”



# Sakinah Aljufri Serahkan Bantuan Laboratorium untuk Kampus Akademi Farmasi di Palu

## KUTIPAN

Palu (22/01) — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Sakinah Aljufri, menyerahkan bantuan hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupa Laboratorium IPA, untuk Akademi Farmasi Tadulako Farma Palu.

Bantuan Laboratorium IPA tersebut merupakan bantuan dari aspirasi Anggota DPR RI Komisi X Fraksi PKS dan diterima langsung oleh Pembina Yayasan Pharmacist, Drs Abd Karim Hanggi Apt, pada Selasa (20/01/2021).

Dalam sambutannya, Sakinah mengatakan bahwa ini adalah bentuk tanggung jawabnya sebagai Anggota DPR yang mewakili rakyat Sulawesi Tengah.

“Tentu yang kami berikan bukanlah hal yang besar, namun inilah bentuk kepedulian kami, bentuk perhatian kami dan bentuk tanggung jawab kami selaku Wakil Rakyat dari Sulawesi Tengah,” ujar Anggota Komisi X DPR RI Dapil Sulawesi

Tengah.

Sakinah berharap agar bantuan yang diberikan dapat bermanfaat bagi kampus dan juga bagi mahasiswa.

“Sehingga menjadi motivasi juga agar dari daerah-daerah lain banyak mahasiswa yang mendaftar ke sini,” ungkapnya.

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) ini.

Tak hanya itu, Sakinah pun menyampaikan bahwa masyarakat Sulawesi Tengah adalah masyarakat yang kuat.

“Masyarakat yang kuat tidak mudah patah semangat, cepat bangkit setelah diterjang gempa dan sunami beberapa tahun lalu, dan sekarang dihadapi pandemi covid-19.

Tapi masyarakat kita masih mampu membantu tetangga kita (provinsi Sulawesi Barat) yang diguncang gempa.”

Turut hadir dalam kegiatan ini, seluruh jajaran yayasan dan manajemen kampus diantaranya Drs Abd Karim Hanggi Apt, Pembina Yayasan Pharmacist, Drs Syahrir Marzuki Apt, Drs Christian Kaloeti Apt, Jamaluddin SSI, Aptu Pengawas Yayasan Pharmacist, Dra Nie Tangkuna MSI, Apt, Drs Gazali Dahlan Apt, Pengurus Yayasan Pharmacist, Drs Nicolas R Passau Apt, Direktur, serta sejumlah mahasiswa Akademi Farmasi Tadulako Farma Palu.

Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19.



**Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag**  
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sulawesi Tengah

“ini adalah bentuk tanggung jawabnya sebagai Anggota DPR yang mewakili rakyat Sulawesi Tengah. Tentu yang kami berikan bukanlah hal yang besar, namun inilah bentuk kepedulian kami, bentuk perhatian kami dan bentuk tanggung jawab kami selaku Wakil Rakyat dari Sulawesi Tengah



*You Stay At Home,  
We Stay At Parliament*



Kunjungi Posko Pengungsian  
Gempa di Sulbar

# Netty Minta Pemerintah **Penuhi** Hak Dasar Korban

## KUTIPAN

Mamuju (23/01) --- Ketua Gugus Tugas  
PKS Peduli Bencana Netty Prasetyani  
meminta pemerintah agar memenuhi hak  
dasar warga negara pasca gempa

"Negara harus memenuhi hak dasar warga negara yang tertimpa musibah berupa akses darurat pendidikan dan layanan psikososial lainnya agar mereka mampu bangkit dan mandiri," ujar anggota Komisi IX DPR RI ini dalam keterangan media, Jum'at, (22/01/2021).

Menurut Netty, kedatangannya ke Sulawesi Barat didampingi Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heryawan adalah untuk meninjau keadaan pengungsi di posko induk, Mamuju, dan daerah lainnya guna memastikan jaminan layanan pemerintah terhadap korban bencana.

"Masyarakat, terutama

kaum perempuan dan anak-anak pasti berada dalam situasi syok dan tertekan setelah mengalami gempa. Pemerintah harus sigap dalam memenuhi kebutuhan makanan, air bersih, MCK dan juga dukungan posko ramah perempuan dan anak," katanya.

Dalam kesempatan itu, Netty menyerahkan bantuan dari DPP PKS berupa sembako, obat-obatan dan utilitas lain yang dibutuhkan masyarakat.

"Ini adalah soal membangun kepedulian dan kesetiakawanan sosial sebagai jatidiri bangsa, bukan tentang berapa besar jumlah bantuan yang diberikan. Jiwa gotong royong akan membuat Indonesia tumbuh sebagai

bangsa besar dan kuat," ujarnya.

Oleh sebab itu, kata Netty, kader PKS diminta hadir menjadi pelayan rakyat dalam setiap situasi dan kondisi.

"Peduli sesama dan menjadi pelayan rakyat harus menjadi DNA kader PKS. Jadi, turun membantu rakyat dilakukan kapan saja, tidak hanya jelang pemilu," katanya.

Netty juga menguatkan hati para pengungsi agar tetap semangat dan optimis.

"Bencana adalah rencana Tuhan untuk menguji kita semua. Bersabar dan tetap semangat akan membuat kita lebih tegar dan optimis mengatasi kesulitan," tutupnya.



**Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si**  
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Kesra

Masyarakat, terutama kaum perempuan dan anak-anak pasti berada dalam situasi syok dan tertekan setelah mengalami gempa. Pemerintah harus sigap dalam memenuhi kebutuhan makanan, air bersih, MCK dan juga dukungan posko ramah perempuan dan anak



# Aleg PKS: Transformasi Desa Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dan Industri Baru

## KUTIPAN

Jakarta (23/01) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS yang juga merupakan Ketua BPJE DPP PKS, Rofik Hananto mengatakan, transformasi desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan industri baru

Menurut Rofik Desa di Indonesia memenuhi syarat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang akan terus berkembang dan sebagai destinasi yang semakin digandrungi.

"Desa itu istimewa. Desa adalah kekayaan yang sangat besar namun belum terolah. Di desa ada air bersih, udara bersih dan makanan sehat," kata Rofik.

Hal tersebut diungkapkan Rofik dalam Webinar Seri 2 dengan tajuk "Menciptakan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan Dan Ekosistem Baru Ekonomi Bangsa" Yang Diadakan Oleh Bidang Pemberdayaan Jaringan Ekonomi (BPJE) DPP PKS, Sabtu (23/01/2021).

Tahun 2015 dana desa dimulai sesuai amanat UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sedangkan UMKM mulai berkembang tahun 2000 paska krisis ekonomi. Dana desa diberikan ke desa dengan beberapa parameter, yakni jumlah penduduk, luas wilayah dan kemiskinan.

Jumlah kemiskinan menjadi dasar pemberian dana desa sebesar 50 persen. Luas wilayah 20 persen dan jumlah penduduk 30 persen. Dan setelah ada UU Desa ini kemudian ada Menteri Desa dan di tahun 2020 di PKS ada Bidang Desa dan Pengembangan Desa," ujar Legislator asal Kabupaten Purbalingga itu.

Rofik menjelaskan, pada kurun waktu 2015-2018 desa melakukan perencanaan. Dana desa dimanfaatkan untuk pelatihan, kegiatan fisik dan pengadaan sarana prasarana, dan beberapa trial project. Di

tahun 2018-2020 desa mulai menampilkan potensi desa dan percontohan. Selain itu diadakan kegiatan pemberdayaan dan menuju destinasi wisata.

"Sedangkan di tahun 2020-2025 desa lebih fokus pada pemberdayaan dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Desa juga mengarah industrialisasi potensi desa. Salah satu contoh desa yang berhasil bertransformasi adalah Desa Rumada di Maluku Tenggara," katanya.

Kemudian dengan desa emas maka UMKM akan berdaya. Pengembangan desa membutuhkan daya tarik. Kita mencoba melakukan bagaimana agar desa terus berdaya. Dan salah satunya adalah melalui UMKM. Desa sebagai pusat pemberdayaan. Showcase potensi UMKM desa menuju destinasi wisata.

"UMKM desa sebagai motor pertumbuhan dan industri baru berbasis potensi ekonomi desa untuk UMKM naik kelas melalui industrialisasi. Karena di situ ada padat karya, padat modal dan kualitas produk. Hal ini pula telah dilakukan Riza dari Banjarnegara yang



## H. ROFIK HANANTO, S.E.

Anggota Fraksi PKS DPR RI / Ketua BPJE DPP PKS

“UMKM desa sebagai motor pertumbuhan dan industri baru berbasis potensi ekonomi desa untuk UMKM naik kelas melalui industrialisasi. Karena di situ ada padat karya, padat modal dan kualitas produk. Hal ini pula telah dilakukan Riza dari Banjarnegara yang mengembangkan tepung mocaf dari desa menjadi sebuah industrialisasi”

mengembangkan tepung mocaf dari desa menjadi sebuah industrialisasi,” jelasnya.

Ini menunjukkan ketika potensi desa digali dan hasilnya bagus membutuhkan proses berikutnya yakni industrialisasi

yang membutuhkan kreativitas lebih bagus lagi. Desa mempunyai potensi luar biasa. Bisa ditunjukkan melalui pariwisata hingga sampai industrialisasi.

# Presiden PKS: Perencanaan Pembangunan Desa Agar Berbasis Data

## KUTIPAN

Jakarta (23/01) — Perencanaan pembangunan di desa diharapkan agar berbasis data desa yang presisi. Data yang presisi ini penting agar pembangunan itu nantinya bisa memberikan efek yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi di desa. Harapan ini disampaikan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Achmad Syaikh.

Jakarta (23/01) — Perencanaan pembangunan di desa diharapkan agar berbasis data desa yang presisi. Data yang presisi ini penting agar pembangunan itu nantinya bisa memberikan efek yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi di desa. Harapan ini disampaikan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Achmad Syaikh.

"Anggaran pemerintah mengucur banyak ke desa. Rata-rata Rp 960 juta-Rp 1 miliar. Sayangnya, penambahan jumlah anggaran kepada desa ini tidak menimbulkan efek

yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi di desa. Persoalannya ternyata dalam proses perencanaan di desa," katanya saat membuka Webinar Nasional, Sabtu (23/01/2021).

Webinar itu bertema Menciptakan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan dan Ekosistem Baru Ekonomi Bangsa. Kegiatan virtual ini diadakan oleh Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi Kader (BPJE) DPP PKS. Webinar nasional kedua ini menghadirkan sejumlah pembicara.

Yakni Menteri Desa, PDT

dan Transmigrasi Dr (HC) Drs H Abdul Halim Iskandar MPd, Ketua BPJE DPP PKS Rofik Hananto SE, Penderita Gerakan Desa Emas Dr Aries Mufti, Wakil Ketua BPJE Riza Zacharias, Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Desa (BPPD) DPP PKS Syahrul Aidi Maazat dan Wakil Bendahara Umum DPP PKS Deni Trisnadi.

Syaikh mengatakan, per Januari 2021 di Indonesia terdapat 74.961 desa. Ini menjadi sesuatu yang sangat strategis untuk diberdayakan. Jika semua desa itu menjadi desa emas maka akan tercipta peradaban yang besar dan kokoh di NKRI.

"Besarnya anggaran kepada desa-desa ini kalau dikelola dengan baik maka masyarakat akan lebih berdaya dan lebih sejahtera. Sayangnya kita terus mengandalkan APBN dan APBD. Padahal potensi di desa sangat luar biasa sehingga mestinya tidak hanya mengandalkan APBN dan APBD," katanya.

Persoalannya, kata Syaikh, ternyata dalam proses perencanaan di desa itu hantam kromo saja. Dari pusat pokoknya desa harus begini,



## H. AHMAD SYAIKHU

Presiden PKS

"Anggaran pemerintah mengucur banyak ke desa. Rata-rata Rp 960 juta-Rp 1 miliar. Sayangnya, penambahan jumlah anggaran kepada desa ini tidak menimbulkan efek yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi di desa. Persoalannya ternyata dalam proses perencanaan di desa

tanpa melihat potensi spesifik desa itu. Perencanaan itu belum didasarkan pada data desa yang presisi.

"Ada 57,7 persen data desa yang tidak akurat. Dampaknya luar biasa. Salah satunya dalam perencanaan di desa. Misalnya desa pertanian

tetapi dalam perencanaannya untuk industri. Desa dengan potensi wisata malah dibuat untuk pertanian. Ini tidak sesuai dengan potensi desanya," katanya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**Kunjungi  
Kanal Resmi  
Fraksi PKS DPR RI**

-  Website  
[fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)
-  Instagram  
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)
-  Twitter  
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)
-  Facebook  
[Fraksi PKS DPR RI](https://www.facebook.com/Fraksi_PKS_DPR_RI)
-  Youtube  
[PKSTV DPR RI](https://www.youtube.com/CKSTV_DPR_RI)

***Nantikan  
Setiap Pekan***